



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jl. Jend. Sudirman Kel. Sriwijaya Kec. Tungkal ILir Kualatungkal

<https://dinkes.tanjabbarkab.go.id/>

Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

@dinkestanjabbarat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah kepada publik/masyarakat berisi informasi capaian atas kinerja instansi pemerintah yang berfungsi sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan instansi pemerintah, media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif dan sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Manfaat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan berpedoman pada hal-hal tersebut diatas Dinas Kesehatan menyampaikan laporan atas kinerja yang dilaksanakan dalam Tahun 2025 dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat Tahun 2025. Bentuk laporan ini telah disusun berdasarkan data-data yang ada di Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

Untuk kesempurnaan laporan ini kami selalu membuka diri terhadap saran dan masukan dari semua pihak agar Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih baik dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Demikian, semoga laporan ini berguna dan bermanfaat. .

Kuala Tungkal, Januari 2026
PLT.KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT



SARAGASHTA FUPANG, SKM, MPH

Pembina Tk.I/IV. b

NIP. 19730106 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	2
1.3 Isu Strategis	9
1.4 Sistematika Laporan Kinerja.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Dinas Kesehatan.....	12
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja	36
3.3 Efektifitas Sumber Daya.....	72
3.4 Realisasi Anggaran.....	76
BAB IV P E N U T U P	97
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Visi,Misi,Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah kabuapten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 Yang Berkaitan Dengan Pembangunan Kesehatan	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Sebelum Perubahan	18
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Sesudah Perubahan	20
Tabel 2.4 Rencana Kerja Program/Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025	21
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dians Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Sebelum Perubahan	25
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Jabung Barata Tahun 2025 Sesudah Perubahan	26
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025	29
Tabel 3.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2025	34
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi IKU Usia Harapan Hidup Tahun 2021-2025	36
Tabel 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap IKU Usia Harapan Hidup Tahun 2025	38
Tabel 3.7 Perbandiangan Realisasi IKU Prevalensi Stunting tahun 2021-2025	39
Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap IKU Prevalensi Stunting Tahun 2025	41
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi IKU Jumlah Kematian Ibu Tahun 2021-2025	42
Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Jumlah Kematian Ibu Tahun 2025	44
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi IKU Jumlah Kematian Balita Tahun 2021-2025	44
Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Jumlah Kematian Balita Tahun 2025	47
Tabel 3.13 Capaian IKU Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Tahun 2025	47
Tabel 3.14 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Tahun 2025	49
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi IKU Cakupan Imunisasi Lengkap Tahun 2021-2025	50
Tabel 3.16 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Tahun 2025	52
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Yang Aktif Tahun 2021-2025	53
Tabel 3.18 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Yang Aktif	

Tahun 2025	55
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi IKU Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Tahun 2021-2025.....	56
Tabel 3.20 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Tahun 2025.....	58
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2021-2025.....	59
Tabel 3.22 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indiaktor Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2025	61
Tabel 3.23 Perbandingan Capaian IKU Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi Tahun 2021-2025.....	62
Tabel 3.24 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi Tahun 2025	64
Tabel 3.25 Capaian Proporsi Penduduk Dengan Aktifitas Fisik Cukup Tahun 2025	65
Tabel 3.26 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Proporsi Penduduk Dengan Aktifitas Fisik Cukup Tahun 2025	67
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi IKU Nilai Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2025.....	68
Tabel 3.28 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	70
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi IKU Nilai AKIP OPD Tahun 2021-2025	70
Tabel 3.20 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai AKIP OPD Tahun 2025	71
Tabel 3.31 Jumlah Sarana Fassilitas Kesehatan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.....	72
Tabel 3.32 Jumlah Sembilan Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.....	73
Tabel 3.33 Data Tenaga Kesehatan RSUD Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025	74
Tabel 3.34 Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di Puskesmas Tahun 2025	75
Tabel 3.35 Persentase Kelengkapan saran,Prasarana dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Tahun 2025.....	75
Tabel 3.36 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025.....	76
Tabel 3.37 Perbandingan Capaian Perubahan Indikator Kinerja Utama Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2025	84
Tabel 3.38 Realisasi Anggaran SPM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.....	86
Tabel 3.39 Realisasi Anggaran Gabungan Dinas Kesehatan dan RSUD Tahun 2025	89

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas umum penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan sistem akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 77 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu instansi Pemerintah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun anggaran 2025. Laporan kinerja ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Bentuk dukungan Dinas Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan *good governance* dengan mendukung pembangunan kesehatan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang sistematis, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja ini adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kepercayaan dan amanat yang telah diberikan serta untuk meningkatkan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
2. Memberikan informasi tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
3. Memberikan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merujuk pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025. Sebagai perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang telah diamanahkan dengan demikian dapat diukur dan diketahui sejauh mana pencapaian sasaran dan kualitas kinerja Dinas Kesehatan KabupatenTanjung Jabung Barat.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang mempunyai kewenangan Daerah di Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Dinas Kesehatan Tipe A yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

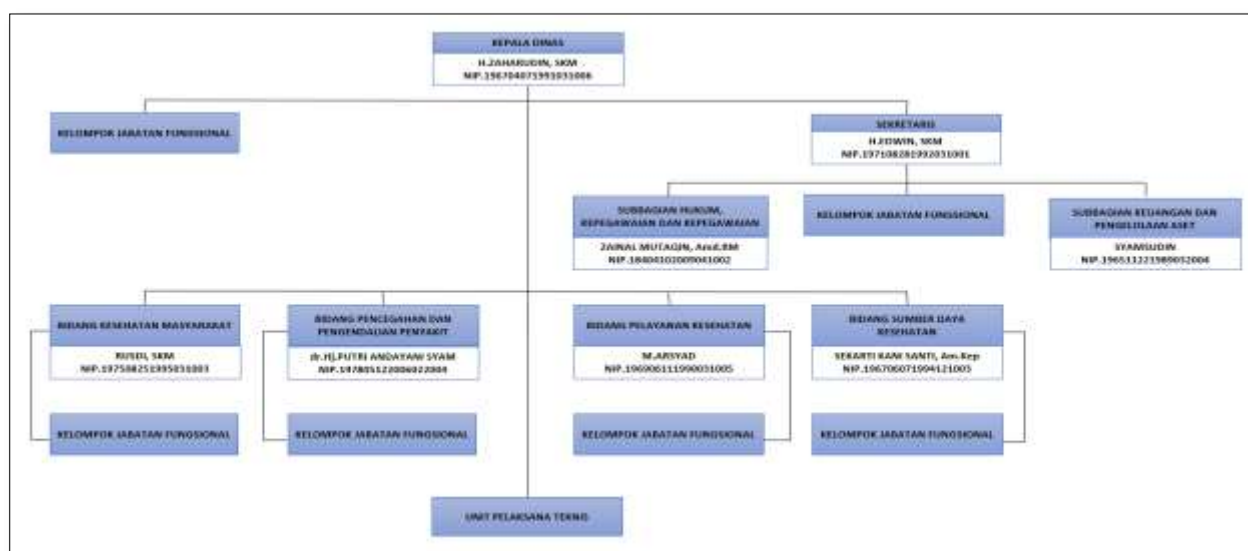
1. Kepala Dinas, sebagai pimpinan Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 - b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsional
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas kelompok jabatan fungsional

5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas kelompok jabatan fungsional

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023



Sumber : Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Kesehatan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian. Alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya Kesehatan
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya Kesehatan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT) serta

sumber daya Kesehatan

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan pada susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah
- d. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum, Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup hukum, kepegawaian dan umum
- b) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis dan koordinasi penatalaksanaan hukum

- c) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas dan penataan kearsipan
 - d) Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan dan tatalaksana
 - e) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas
 - f) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya
- 2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
- a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan
 - b) Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 - c) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan
 - d) Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset
 - e) Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan
 - f) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas
 - g) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya
2. Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang Kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas, bidang Kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang Kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Adapun tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan

dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa

- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan Kesehatan tradisional. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan Kesehatan tradisional
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan Kesehatan tradisional
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan Kesehatan tradisional
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan Kesehatan tradisional
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

5. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang sumber daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang sumber daya Kesehatan mempunyai fungsi, yaitu:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia Kesehatan
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia Kesehatan
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia Kesehatan
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat Kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia Kesehatan
- e) Pelaksanaan tugas slain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keterampilan dan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas perangkat daerah sesuai dengan bidang keterampilan dan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya. Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan terdiri dari 1 UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi dan 16 Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas.

Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pengadaan, penerimaan, pengelolaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan serta evaluasi obat dan alat Kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan Kesehatan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas, UPTD Puskesmas memiliki fungsi yaitu:

- a) Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya
- b) Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya
- c) Wahana Pendidikan bidang Kesehatan, wahana program internship dan/atau sebagai jejaring rumah sakit Pendidikan.

1.3 Isu Strategis

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pemeran utama dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggandeng *stakeholder* baik swasta dan masyarakat. Pembangunan kesehatan tidak hanya mewujudkan masyarakat sehat secara fisik, namun juga sehat secara mental sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang profesional, sehat, cerdas dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia dengan sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Telah banyak pencapaian yang diraih oleh Dinas Kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025. Berbagai program dan kegiatan direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari angka harapan hidup sebesar 73,41 tahun 2025 dan Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan mencapai 87,68 (kategori Baik). Pencapaian pembangunan lainnya yaitu pada tahun 2025, Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mencapai target UHC sebesar 99,79%. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan. Penurunan prevalensi stunting dari 14% pada tahun 2024 menjadi 7% pada tahun 2025. Keberhasilan penurunan prevalensi stunting tidak lepas dari

Kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan dengan stakeholder dan masyarakat dalam melaksanakan program-program yang mendukung penurunan prevalensi stunting. Terlaksananya program pelayanan kesehatan di daerah terpencil untuk menjangkau masyarakat dengan akses layanan kesehatan sulit, menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian neonatal, meningkatnya pemberantasan penyakit menular dan tidak menular (success rate TBC 89,22%, penemuan kasus HIV/AIDS yang diobati 87,50%).

Disamping keberhasilan program pembangunan kesehatan, masih terdapat isu-isu strategis bidang kesehatan yang perlu untuk diintervensi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun isu-isu strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih terdapat kematian ibu dan balita. Sebagian besar penyebab kematian ibu dan balita merupakan kasus yang dapat dicegah atau pun dicegah Sebagian.
2. Permasalahan stunting dan wasting. Kompleksnya permasalahan kesehatan ibu dan anak berdampak pada masih didapatinya kasus stunting dan wasting.
3. Penyakit menular dan tidak menular masih tinggi (TB, HIV/AIDS, Hipertensi, Diabetes Mellitus, dll).
4. Cakupan imunisasi dasar belum tercapai
5. Mutu dan akses layanan kesehatan belum terjangkau semua masyarakat
6. Sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan belum sesuai standar. Upaya pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dilakukan
7. Fasilitas kesehatan sesuai standar mulai dari tingkat desa belum merata
8. Peserta jaminan kesehatan nasional yang nonaktif
9. Fasilitas kesehatan penunjang (Labkesmas) yang belum tersedia
10. Pemenuhan SDM kesehatan baik kuantitas dan kualitas belum merata
11. Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui Germas belum maksimal
12. Rendahnya desa ODF
13. Koordinasi lintas program dan lintas sektor belum optimal dalam upaya pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan meliputi:

1. BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Kesehatan, sumber daya kesehatan serta sistematika penulisan laporan

2. BAB Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai

3. BAB III Akuntabilitas

Menjelaskan tentang pengukuran dan analisis capaian kinerja, realisasi anggaran serta sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kesehatan

4. BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan dari laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dasar pembangunan kesehatan adalah nilai kebenaran dan aturan pokok yang menjadi landasan untuk berfikir bertindak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan dengan landasan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.

2.1 Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Dinas Kesehatan

Pada tahun 2025 merupakan masa transisi Kepala Daerah masa bakti 2025-2029, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan kesehatan telah ditetapkan RPJMD tahun 2025-2029 pada tanggal 20 Agustus 2025 yang memuat visi dan misi kepala daerah terbaru dan strategi serta arah kebijakan pembangunan kesehatan yaitu

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 Yang
Berkaitan Dengan Pembangunan Kesehatan

VISI : KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi I : Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata Pencegahan dan pengendalian penyakit secara	• Peningkatan kapasitas dan status kelembagaan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas • Perluasan jangkauan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan Optimalisasi fungsi Puskesmas dan Pustu sebagai pusat layanan kesehatan dasar • Peningkatan cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) • Peningkatan edukasi dan literasi kesehatan masyarakat

		promotif dan preventif	• Penguatan layanan promotif dan preventif di fasilitas kesehatan • Deteksi dini dan surveilans penyakit menular dan tidak menular • Peningkatan cakupan imunisasi dan intervensi gizi spesifik
		Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak.	• Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan nifas • Peningkatan pelayanan neonatal, bayi, dan balita • Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan KIA • Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pelayanan KIA
Misi 2 : Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaftif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja	• Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja • Peningkatan kualitas penyusunan indikator kinerja dan perjanjian kinerja • Penguatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) • Penerapan sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029

a. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

Sebelum tersusunnya RPJMD dan Renstra 2025-2029, Dinas Kesehatan kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menjalankan program-program kesehatan sesuai yang direncanakan pada RPJMD 2021-2026 yang bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan Mutu Fasilitas Kesehatan
 - Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan Kesehatan
 - Persentase pelayanan Kesehatan di daerah terpencil
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - Angka kematian ibu
 - Angka kematian neonatal
3. Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat
 - Prevalensi stunting
4. Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Succes rate TBC
 - Persentase penemuan kasus HIV/AIDS yang diobati
 - Prevalensi Hipertensi
 - Prevalensi Diabetes Mellitus (DM)
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di FKTP
 - Nilai AKIP

Kemudian, pada tanggal 19 September 2025 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan oleh Kepala Daerah masa bakti 2025-2029 sehingga terdapat perubahan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan. Tujuan Pembangunan Kesehatan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator kinerja utama Usia Harapan Hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran sebagai berikut

1. Tercapainya masyarakat sehat dan produktif sesuai siklus hidup dengan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau dengan indikator sasaran yaitu:
 - 1) Prevalensi Stunting
 - 2) Jumlah Kematian Ibu
 - 3) Jumlah Kematian Balita
 - 4) Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis
 - 5) Cakupan imunisasi bayi lengkap

- 6) Angka keberhasilan pengobatan (Succes Rate/SR) TBC
- 7) Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
- 8) Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan Aktif (JKN)
2. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan akses sumber daya kesehatan dengan indikator sasaran yaitu:
 - 1) Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi
3. Meningkatnya pengendalian penyakit melalui upaya pembudayaan hidup sehat, dengan indikator sasaran yaitu:
 - 1) Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup
4. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik, dengan indikator sasaran yaitu:
 - 1) Nilai Sakip
 - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Kesehatan

Arah kebijakan yang ditetapkan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 sebelum ditetapkannya Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar
2. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas
3. Pelayanan Kesehatan dan perbaikan gizi menggunakan pendekatan siklus hidup mulai dari ibu hamil, bayi, anak, balita, anak usia sekolah secara continue
4. Rencana Aksi Program Kesehatan Masyarakat
5. Pembudayaan PHBS melalui Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat serta melakukan kampanye stop buang asir besar sembarangan (STOP BABS) dan dukungan lintas sektor
6. Peningkatan kapasitas SDM penyakit menular dan tidak menular
7. Pemenuhan sarana prasarana pendukung
8. Pembangunan system kewaspadaan dini dan respon krisis Kesehatan serta mengembangkan dan akselerasi kapasitas sumber daya jejaring petugas surveilans
9. Peningkatan pembiayaan Kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan nasional

10. Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan, pengukuran, laporan, evaluasi dan capaian kinerja

Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebelum ditetapkannya Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana, prasarana pelayanan Kesehatan, alat Kesehatan serta obat-obatan dan sumber daya manusia Kesehatan yang berkompeten dan merata
2. Peningkatan Kesehatan ibu, anak, Kesehatan reproduksi dan perbaikan Gizi masyarakat
3. Promosi PHBS dan menggerakkan masyarakat akan kebutuhan sanitasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui koordinasi dan komunikasi serta edukasi dalam penggerakan masyarakat
4. Peningkatan sosialisasi dan advokasi kebijakan terhadap program Kesehatan penyakit menular dan tidak menular
5. Penguatan jejaring petugas surveilans dalam penemuan kasus potensial wabah dan bencana serta deteksi dini kasus KIPI dan akselerasi capaian desa UCI
6. Koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
7. Optimalisasi manajemen publik dengan mengedepankan pelayanan prima

Sejak ditetapkannya Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 pada tanggal 19 September 2025, maka arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan untuk pencapaian tujuan pembangunan kesehatan untuk 5 (lima) tahun kedepan mengalami perubahan. Adapun arah kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 adalah

1. Penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
2. Pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi dengan pendekatan siklus hidup mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak pra sekolah dan usia pendidikan dasar, usia produktif dan lansia
3. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG)
4. Pemberian makanan tambahan pangan lokal
5. Pembinaan pengawasan terhadap pengelolaan makanan
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular prioritas

7. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular prioritas
8. Pemberian imunisasi dasar lengkap
9. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan sampai tingkat desa sesuai standar
10. Pemenuhan Standar Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan
11. Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di Fasilitas Kesehatan
12. Pemenuhan Sumber daya manusia kesehatan yang kompeten
13. Pemenuhan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapat Jaminan Kesehatan Nasional
14. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat
15. Pembudayaan PHBS melalui gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat serta Melakukan kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) dan dukungan lintas sektor
16. Pemenuhan Sarana prasarana pendukung di fasilitas kesehatan
17. Pembangunan system kewaspadaan dini dan respon krisis kesehatan serta mengembangkan dan akselerasi kapasitas sumber daya jejaring petugas surveilans.
18. Peningkatan kualitas dan implentasi perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi dan pelaporan kinerja

Sedangkan strategi yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 adalah

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi menggunakan pendekatan siklus hidup
2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui pembudayaan hidup sehat
3. Penyediaan sarana, prasarana pelayanan kesehatan, alat kesehatan serta obat-obatan dan SDM kesehatan yang berkompeten dan merata
4. Koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan nasional
5. Optimalisasi manajemen publik dengan mengedepankan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas

2.2 Perjanjian Kinerja

Masalah kesehatan tidak akan selesai hanya dengan Dinas kesehatan, namun harus ada dukungan dari berbagai sektor yang bersinergi dalam menghadapi tantangan bidang kesehatan selama kurun waktu yang ditentukan. Berdasarkan dokumen lima tahunan rencana strategi Dinas Kesehatan tahun 2021-2026, yang merupakan rencana kegiatan Dinas Kesehatan terdapat 13 indikator utama Dinas Kesehatan pada tahun 2025 yang tertera pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Sebelum Perubahan

No	Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja Utama OPD	Target
1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Fasilitas Kesehatan	1.	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	82%
		2.	Persentase Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil	50%
		3.	Angka Harapan Hidup	68,49 tahun
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat	1.	Angka kematian ibu	180/100.000 KLH
		2.	Angka kematian neonatal	9/1000 KLH
3.	Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat	1.	Prevalensi Stunting	15%
4.	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Menular dan tidak menular	1.	Succses Rate TBC	100%
		2.	Persentase Desa/Kelurahan UCI	95%
		3.	Persentase Penemuan kasus HIV/AIDS yang Diobati	62%
		4.	Prevalensi Hipertensi	30,50%
		5.	Prevalensi Diabetes Melitus (DM)	1,50%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84
		2.	Nilai SAKIP	78,00

Adapun indikator kinerja utama Dinas Kesehatan yang ingin dicapai pada tahun 2025 sebelum perubahan adalah

1. Persentase masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan dengan target 82%
2. Persentase pelayanan Kesehatan di daerah terpencil dengan target 50%
3. Angka kematian ibu dengan target 180 per 100.000 KLH
4. Angka kematian neonatal dengan target 9 per 1.000 KL
5. Prevalensi stunting dengan target 15%

6. Succes rate TB dengan target 100%
7. Persentase desa/kelurahan UCI dengan target 95%
8. Persentase Penemuan kasus HIV/AIDS yang Diobati dengan target 62%
9. Prevalensi hiperensi dengan target 30,50%
10. Prevalensi Diabetes Melitus dengan target 1,50%
11. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 84
12. Nilai SAKIP dengan target 78,00

Namun, seiring dengan telah ditetapkannya Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 per tanggal 19 September 2025, maka terdapat perubahan indikator kinerja yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

Terdapat Perbedaan Indikator Utama Dinas Kesehatan sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 . Adapun Perubahan IKU Dinas Kesehatan pada tahun 2025 yang ingin dicapai sebagai berikut

1. Usia Harapan Hidup dengan target sebesar 73,59 tahun
2. Prevalensi stunting dengan target 6,65%
3. Jumlah kematian ibu dengan target 9 orang
4. Jumlah kematian balita dengan target 94 orang
5. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis dengan target sebesar 6,47%
6. Cakupan imunisasi bayi lengkap dengan target sebesar 81%
7. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang aktif dengan target sebesar 80%
8. Angka keberhasilan pengobatan TB dengan target sebesar 90%
9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target sebesar 100%
10. Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi dengan target sebesar 5,4 per 1000 penduduk
11. Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup dengan target sebesar 65%
12. Nilai SAKIP OPD dengan target sebesar 80
13. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 87,75

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Sesudah Perubahan**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	73,59 Tahun
2	Tercapainya masyarakat sehat dan produktif sesuai siklus hidup dengan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	2. Prevalensi Stunting	6,65%
		3. Jumlah kematian ibu	9 orang
		4. Jumlah kematian Balita	94 orang
		5. Cakupan Penerima pemeriksaan Kesehatan gratis	6,47%
		6. Cakupan Imunisasi bayi lengkap	81%
		7. Cakupan kepesertaan Jaminan kesehatan yang aktif	80%
		8. Angka keberhasilan pengobatan TB	90%
		9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
3	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan akses Sumber Daya Kesehatan	10. Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi	5,4 / 1000 Penduduk
4	Meningkatnya pengendalian penyakit melalui upaya pembudayaan hidup sehat	11. Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup	65%
5.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan publik	12. Nilai SAKIP OPD	80
		13. Indeks Kepuasan Masyarakat	87,75

Untuk mencapai target indikator tersebut, Dinas Kesehatan merencanakan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan kesehatan dan mendapatkan anggaran dengan PAGU sebesar Rp.208.143.205.241,- . Rencana Program/Kegiatan dan anggaran dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Rencana Kerja Program/Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun 2025

No.	Unit Kerja>Nama Program/Uraian Sub Kegiatan	Target	Jumlah DPA
			Pagu Rp.
DINAS KESEHATAN			
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			118.976.964.245,00
01:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		356.213.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	194.213.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	162.000.000,00
01:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		97.036.213.471,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	612 Orang/ Bulan	95.591.356.471,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.239.360.000,00
3	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhr Tahun SKPD	12 Laporan	97.452.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	108.045.000,00
01:03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		50.819.200,00
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.819.200,00
01:04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		218.950.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	320 Paket	218.950.000,00
01:05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		707.558.250,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 Paket	45.712.500,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Paket	205.784.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	56.127.950,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17 Paket	116.514.800,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	24.000.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	259.419.000,00
01:06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		960.382.453,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	518.128.853,00
1	Pengadaan Mebel	17 Unit	33.959.000,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	408.294.600,00
01:07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		729.964.700,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.500.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	602.049.000,00

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	117.415.700,00
01:08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.411.325.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	85.798.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32 Unit	486.992.000,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211 Unit	225.795.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	612.740.000,00
01:09	Peningkatan Pelayanan BLUD		17.505.538.171,00
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	16 Unit Kerja	17.505.538.171,00
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			83.038.840.196,00
02:01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota		29.126.109.394,00
1	Pembangunan Puskesmas	2 Unit	4.175.031.500,00
2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	2 Unit	944.270.000,00
3	Pengembangan Puskesmas	11 Unit	2.179.835.300,00
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	11 Unit	1.942.000.000,00
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya.	16 Unit	991.931.400,00
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4 Unit	969.240.000,00
8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22 Unit	8.174.500.000,00
9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30 Unit	179.973.000,00
10	Pengadaan Obat, Bahan Abis Pakai, Bahan Medis Habis Pakaian, Vaksin, Makanan, dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2 Paket	9.201.350.194,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	63898 Keluarga	21.600.000,00
12	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	4 Paket	346.378.000,00
02:02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota		53.673.803.802,00
1	pengelola pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6290 Orang	120.949.300,00
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6070 Orang	499.577.000,00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5718 Orang	139.800.697,00
4	pengelola Pelayanan Kesehatan Balita	23998 Orang	24.954.800,00
5	pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	37065 Orang	24.184.800,00
6	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	217986 Orang	170.667.300,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	20098 Orang	123.763.800,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	76833 Orang	36.252.600,00

9	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	3767 Orang	770.907.400,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	801 Orang	51.243.600,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1855 Orang	585.694.100,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4486 Orang	28.800.000,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3 Dokumen	78.800.000,00
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20 Dokumen	5.820.673.675,00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	731.233.374,00
16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	379.467.900,00
17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	130.232.800,00
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1363 Orang	36.240.000,00
19	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	200 Orang	64.929.800,00
20	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23 Dokumen	3.580.739.456,00
21	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	32.478.433.400,00
22	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	230 Paket	211.374.800,00
23	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	3.024.135.000,00
24	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	219.755.000,00
25	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	12 Unit	113.880.000,00
26	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	58.109.800,00
27	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	17.310.000,00
28	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	253.171.400,00
29	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	16 Dokumen	3.898.522.000,00
02:03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		143.927.000,00
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	143.927.000,00
02:04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		95.000.000,00
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	16 Unit	95.000.000,00
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			5.525.212.800,00
03:01	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		4.745.384.800,00
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	203.220.800,00
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	390Orang	4.416.300.000,00
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	125.864.000,00

03:02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		779.828.000,00
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	195 Orang	779.828.000,00
4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			417.558.000,00
04:01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		133.500.000,00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen	133.500.000,00
04:02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		36.085.000,00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	36.085.000,00
04:03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		42.090.000,00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2 Dokumen	42.090.000,00
04:04	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		35.473.000,00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	35.473.000,00
04:05	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		170.410.000,00
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	75 Unit	170.410.000,00
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			184.630.000,00
05:01	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		90.000.000,00
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	90.000.000,00
05:02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		94.630.000,00
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	94.630.000,00
			208.143.205.241,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Sebelum Perubahan

No	Sasaran Kinerja		IKU OPD	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Fasilitas Kesehatan	1.	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	82%	99,79%	121,70%
		2.	Persentase Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil	50%	50%	100%
		3.	Angka Harapan Hidup	68,49	73,75	107,68%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat	1.	Angka kematian ibu	180/ 100.000 KLH	63,44/100.000 KLH	164,76%
		2.	Angka kematian neonatal	9/1000 KLH	4,59/1000 KLH	149,00%
3.	Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat	1.	Prevalensi Stunting	15%	7%	153,33%
4.	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Menular dan tidak menular	1.	Succses Rate TBC	100%	87,35%	87,35%
		2.	Persentase Desa/Kelurahan UCI	95%	93,30%	98,21%
		3.	Persentase Penemuan kasus HIV/AIDS yang Diobati	62%	79,31%	127,92%
		4.	Prevalensi Hipertensi	30,50%	27,01%	114,26%
		5.	Prevalensi Diabetes Melitus (DM)	1,50%	2,03%	108,67%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	88,14	104,93%
		2.	Nilai SAKIP	78	80,03	102,60%

Dari data capaian IKU sebelum perubahan pada tabel 3.1, dapat diketahui bahwa

1. Indikator Kinerja yang telah mencapai target yaitu Persentase Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil
2. Indikator kinerja yang melebihi target yaitu Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan, Angka Harapan Hidup, Angka kematian ibu, Angka kematian neonatal, Prevalensi Stunting, Persentase Penemuan kasus HIV/AIDS yang Diobati, Prevalensi Hipertensi, Prevalensi Diabetes Melitus (DM), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Nilai SAKIP
3. Indikator yang belum mencapai target yaitu Succses Rate TBC dan Persentase Desa/Kelurahan UCI

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Sesudah Perubahan

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI	RASIO CAPAIAN	KET
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,59	73,75	100,22%	
2	Tercapainya Masyarakat sehat dan produktif sesuai siklus hidup dengan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	2. Prevalensi stunting (%)	6,65	7,00	94,74%	Data masih berdasarkan data survey tahun 2024 karena data survey tahun 2025 belum terbit
		3. Jumlah Kematian Ibu (Orang)	9	4	155,55%	
		4. Jumlah Kematian Balita (orang)	94	29	169,14%	
		5. Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	36	16,19	44,97%	Indikator baru
		6. Cakupan Imunisasi bayi lengkap (%)	81	80	98,77%	
		7. Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan yang aktif (%)	80	82	102,50%	

		8. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (%)	90	87,35	97,06%	
		9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	56,22	56,22%	
3	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan akses sumber daya kesehatan	10. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (Per 1000 penduduk)	5,4	2,75	50,93%	Indikator baru
4	Meningkatnya pengendalian penyakit melalui upaya pembudayaan hidup sehat	11. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	65,00	0	0,00%	Indikator baru dan data berdasarkan hasil survey oleh Kementrian Kesehatan
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan publik	12 Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM)	87,75	88,14	100,44%	
		13. Nilai AKIP OPD	78,50	80,03	101,95%	

Dari data Capaian IKU sebelum perubahan pada tabel 3.2, dapat diketahui bahwa

1. Indikator yang telah mencapai dan melebihi target yaitu Umur Harapan Hidup, Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Kematian Balita, Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan yang aktif, Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dan Nilai AKIP OPD
2. Indikator yang belum mencapai target yaitu Prevalensi stunting, Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Cakupan Imunisasi bayi lengkap, Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis, Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (Per 1000 penduduk), Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup, Nilai Survey kepuasan masyarakat, dan Nilai AKIP OPD.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Sasaran Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan		Penanggung Jawab	Realisasi Program/Kegiatan		Capaian Program/Kegiatan
	Volume	Satuan		Volume	Satuan	
DINAS KESEHATAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	persen		100%	persen	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	persen		100%	persen	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	Sekretariat (Perencanaan)	5	dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	Sekretariat (Perencanaan)	4	laporan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	persen		100%	persen	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	612	orang	Sekretariat (Keuangan)	612	orang	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	Sekretariat (Keuangan)	12	dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	laporan	Sekretariat (Keuangan)	12	laporan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	Sekretariat (Keuangan)	12	Laporan	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	%		100%	%	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	Sekretariat (Aset Keuangan)	1	dokumen	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	%		100%	%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	365	Paket	Sekretariat (Umum)	365	Paket	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	%		100%	%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	18	paket	Sekretariat (Keuangan)	18	paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18	paket	Sekretariat (Umum)	18	paket	100%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18	paket	Sekretariat (Umum)	18	paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18	paket	Sekretariat (Umum)	18	paket	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	dokumen	Sekretariat (Keuangan)	12	dokumen	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	Sekretariat (Keuangan)	12	laporan	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	Persen		85%	%	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	Aset	1	Unit	100%
Pengadaan Mebel	17	Unit	Sekretariat (Keuangan)	17	Unit	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41	unit	Sekretariat (Keuangan)	41	unit	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	%		100%	%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	Sekretariat (Keuangan)	12	laporan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	Sekretariat (Keuangan)	12	laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	Sekretariat (Keuangan)	12	laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persen		100%	%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	unit	Sekretariat (Aset Keuangan)	2	unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32	unit	Sekretariat (Aset Keuangan)	32	unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211	unit	Sekretariat (Umum)	211	unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10	unit	Sekretariat (Keuangan)	10	unit	100%

Peningkatan Pelayanan BLUD	16	unit kerja		16	unit kerja	100%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	16	unit kerja	Puskesmas	16	Unit	100%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	Persen		99,39%	Persen	99,39%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	74%	Persen		74%	Persen	100%
Pembangunan Puskesmas	2	Unit	Sekretariat (Keuangan)	2	Unit	100%
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	2	Unit	Sekretariat (Aset Keuangan)	2	Unit	100%
Pengembangan Puskesmas	11	Unit	Sekretariat (Aset Keuangan)	11	Unit	100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	11	Unit	Sekretariat (Aset Keuangan)	11	Unit	100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16	Unit	Sekretariat (Aset Keuangan)	16	Unit	100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4	unit	Sekretariat (Aset Keuangan)	4	Unit	100%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22	Unit	Bid. SDM	22	Unit	100%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30	Unit	Bid. SDM	30	Unit	100%
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2	Paket	Bid. SDM	2	Paket	100%
Peengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	63898	Keluarga	Bid. Yankes	63898	Keluarga	100%
Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	4	Paket	Bid. SDM	4	Paket	100%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	18	Faskes		18	Faskes	98%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6290	orang	Bid. Kesmas	6290	orang	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6070	orang	Bid. Kesmas	6070	orang	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5718	orang	Bid. Kesmas	5718	orang	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23998	orang	Bid. Kesmas	23998	orang	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37065	orang	Bid. Kesmas	37065	orang	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	220375	orang	Bid.P2	159962	orang	73%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20098	orang	Bid. Kesmas	20098	orang	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	76865	orang	Bid. P2P	43212	orang	56%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3780	orang	Bid.P2	3780	orang	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	543	orang	Bid.P2	543	orang	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5025	orang	Bid.P2	5025	orang	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6580	orang	Bid.P2	6580	orang	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3	Dokumen	Bid.P2	3	Dokumen	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20	Dokumen	Bid. Kesmas	20	Dokumen	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	Bid.Kesmas	1	Dokumen	100%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	Bid.Kesmas	1	Dokumen	100%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6	Dokumen	Bid.P2	6	Dokumen	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1363	Orang	Bid.P2	1363	Orang	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	200	orang	Bid.P2	200	orang	100%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23	Dokumen	Bid. P2P	23	Dokumen	100%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	Bid. Yankes	1	Dokumen	100%
Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Dokumen	Puskesmas	12	Dokumen	100%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	230	Paket	Bid. P2P	230	Paket	100%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	Dokumen	Bid. Yankes	3	Dokumen	100%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	12	Unit	Bid. Yankes	12	Unit	100%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	Laporan	Bid. P2P	1	Laporan	100%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	dokumen	Bid. P2P	1	dokumen	100%
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	Bid. Yankes	1	Unit	100%

Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	16	Dokumen	Puskesmas	16	paket	100%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2	Dokumen		2	Dokumen	100%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2	Dokumen	Sekretariat (Perencanaan)	2	Dokumen	100%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18	Dokumen		18	Dokumen	100%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	16	unit	Bid.Yankes	16	unit	100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	93,75% 81,25%	Persen		93,75% 81,25%	%	100%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	80	Orang		80	Orang	100%
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	dokumen	Bid. SDK	2	dokumen	100%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	390	orang	Bid. SDK	390	orang	100%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12	Dokumen	Bid.Yankes	12	Dokumen	100%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	511	orang		511	orang	100%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	195	orang	Bid. SDK	195	orang	100%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	45% 45%	%		45% 45%	%	100%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	%		100%	dokumen	100%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3	dokumen	Bid. SDK	3	dokumen	100%
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	130	sampel		130	sampel	100%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	dokumen	Bid. SDK	1	dokumen	100,00%

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80	IRTP		40	IRTP	100%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	dokumen	Bid. SDK	1	dokumen	100%
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	40	Orang		40	Orang	100%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Dokumen	Bid. SDK	1	Dokumen	100%
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	90	IRTP		90	IRTP	100%
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	75	Unit	Bid. SDK	75	unit	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	93%	Persen		93%	%	100%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25%	Persen		25%	Persen	100%
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	Bid.Kesmas	1	Dokumen	100%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	225	Posyandu		225	Posyandu	100%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen	Bid.Kesmas	1	Dokumen	100%
Jumlah				98,48		99,88

Dari tabel 3.3 diatas diperoleh informasi sebagai berikut bahwa Rata-rata capaian kinerja program sebesar 99,88 dan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 98,48.

Tabel 3.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENERIMA MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM (%)	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	6.539	6.338	96,93	1.245.467	1.219.335	83,86	94,31	TUNTAS UTAMA
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	6.539	6.207	94,92	28.015	26.008	73,07	90,55	TUNTAS UTAMA
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	6.305	6.269	99,43	60.467	51.606	76,32	94,81	TUNTAS UTAMA
4	Pelayanan kesehatan balita (12 – 59 bulan)	24.339	24.339	100,00	155.121	151.956	90,16	98,03	TUNTAS UTAMA
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	50.787	50.787	100,00	596.254	490.510	79,13	95,83	TUNTAS UTAMA
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	220.375	159.962	72,59	177.000	13.847	79,33	73,93	TUNTAS PRATAMA
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	31.643	30.050	94,97	97.718	92.169	81,89	92,35	TUNTAS UTAMA
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	76.865	43.212	56,22	79.036	78.218	77,63	60,50	TUNTAS MUDA
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	3.780	3.780	100,00	9.801	8.935	75,22	95,04	TUNTAS UTAMA
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	543	543	100,00	56.808	35.009	73,51	94,70	TUNTAS UTAMA
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	5.025	5.025	100,00	174.285	170.472	98,16	99,63	TUNTAS UTAMA

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(Human Immunodeficiency Virus=HIV)	7.199	7.124	98,96	17.409	14.381	96,49	98,47	TUNTAS UTAMA
TOTAL KABUPATEN				92,83			82,06	90,68	TUNTAS UTAMA

Dari tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa

1. Capaian standar pelayanan minimal kesehatan termasuk dalam kategori Tuntas Utama dengan indeks Standar Pelayanan minimal sebesar 90,69.
2. Indikator Standar pelayanan minimal kategori Tuntas Utama yaitu Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita (12 – 59 bulan), Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(Human Immunodeficiency Virus=HIV).
3. Indikator Standar pelayanan minimal kategori Tuntas Pratama yaitu Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
4. Indikator Standar Pelayanan minimal kategori Tuntas Muda yaitu Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

a. Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Adapun uraian realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan sebagai berikut

1. Usia Harapan Hidup

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi IKU Usia Harapan Hidup Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2030
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,41	68,12	68,43	68,67	73,41	73,59	73,75	100,22	74,29
	Rata-rata Capaian Kinerja								107,32	

Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kesehatan dengan indikatornya Umur Harapan Hidup. Umur Harapan Hidup dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang. Umur harapan hidup dipengaruhi oleh akses terhadap Kesehatan, keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, keadaan perekonomian masyarakat dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Pada tahun 2025, data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil long form SP2020 untuk Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 73,75 tahun dari target sebesar 73,59 tahun. Ini berarti pada tahun 2025, Umur Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat dan melebihi yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 (tabel 3.5), realisasi umur Harapan Hidup terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, umur harapan hidup adalah 68,12 tahun, meningkat menjadi 68,43 tahun pada tahun 2022, kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 68,67 tahun, pada tahun 2024 meningkat tajam menjadi 73,41 tahun dan tahun 2025 terus meningkat menjadi 73,75 tahun. Dari data diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja untuk indikator Umur Harapan Hidup sebesar 100,22%.

Faktor keberhasilan peningkatan pencapaian umur harapan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:

- a) Ketersediaan fasilitas Kesehatan yang terdiri dari 16 puskesmas, 2 RSUD, dan 76 Pustu
- b) Ketersediaan UKBM Posyandu, Poskesdes, Posbindu, dll
- c) Pemenuhan sarana prasarana Kesehatan sesuai standar secara bertahap di fasilitas kesehatan
- d) Pemenuhan dan distribusi sumber daya manusia bidang Kesehatan,
- e) Dukungan lintas sektor terkait mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten,
- f) Peran swasta/stakeholder bidang Kesehatan (Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, Klinik Kesehatan dll)

Walaupun Indikator kinerja umur harapan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat dan melebihi target pada tahun 2025, namun masih didapati faktor-faktor penghambat yang dapat saja mempengaruhi umur harapan hidup, diantaranya:

- a) Posisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di daerah pasang surut sehingga berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesehatan lingkungan
- b) Masih terdapat masyarakat dengan akses pelayanan Kesehatan sulit terutama di daerah terpencil dan perbatasan
- c) Rendahnya Partisipasi masyarakat mengikuti UKBM untuk meningkatkan Kesehatan, diantaranya Posyandu, Bina Keluarga Remaja, dll.
- d) Masih terdapat fasilitas Kesehatan dengan kuantitas sumber daya manusia belum sesuai standar
- e) Masih terdapat fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana dan alat Kesehatan belum sesuai standar

Adapun solusi yang dapat disampaikan untuk mengatasi hambatan dalam upaya peningkatan umur harapan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam upaya perbaikan dan menciptakan lingkungan hidup sehat untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat
- b) Meningkatkan pelayanan Kesehatan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan Kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan
- c) Penggerakan dan Pemberdayaan masyarakat melalui upaya persuasif dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat Kesehatan

- d) Melakukan rekrutmen tenaga Kesehatan untuk memenuhi sumber daya manusia Kesehatan sesuai standar
- e) Pemenuhan sarana prasarana dan alat Kesehatan yang sesuai standar di fasilitas Kesehatan
- f) Meningkatkan Kerjasama dengan pihak swasta/stakeholder dalam upaya meningkatkan kualitas sarana prasarana Kesehatan

Tabel 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap
IKU Usia Harapan Hidup Tahun 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.673.803.802	50.977.144.485	2.696.663.317	94,98%	5,02%
	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
JUMLAH		53.673.803.802	50.977.144.485	2.696.663.317	94,98%	5,02%

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 53.673.803.802,00 untuk mendukung tercapainya IKU Usia Harapan Hidup pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan telah realisasi anggaran sebesar RP 50.977.144.485,00 atau 94,98% dengan Persentase efisiensi anggaran sebesar 5,02%.

b. SASARAN I : Tercapainya Masyarakat sehat dan produktif sesuai siklus hidup dengan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau

2. Prevalensi Stunting

Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur dan jenis kelamin balita. Prevalensi Balita Stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Perbandingan realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7.

3.7 Perbandingan Realisasi IKU Prevalensi Stunting Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2030
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Prevalensi Stunting (%)	7	19,80	9,90	14,10	7,00	6,65	7	94,74	5,25
	Rata-rata Capaian Kinerja								94,74	

. Dari tabel 3.7 dapat dilihat bahwa Prevalensi stunting pada tahun 2025 sebesar 7% dari target 6,65% dengan rasio capaian kinerja sebesar 94,74%. Data stunting tahun 2025 masih menggunakan data survei tahun 2024 karena data survei 2025 sampai saat ini belum diterbitkan. Indikator prevalensi stunting adalah indikator kinerja negative dimana apabila realisasi kinerja lebih rendah dari yang ditargetkan maka rasio capaian kinerja lebih bagus. Semakin rendah prevalensi stunting maka kinerja Dinas Kesehatan untuk penurunan prevalensi stunting semakin bagus.

Prevalensi stunting pada tahun 2021 masih sangat tinggi mencapai 19,80%. Prevalensi stunting tahun 2022 berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021 sebesar 9,9%. Prevalensi stunting tahun 2023 berdasarkan Hasil Data Survei Kesehatan Indonesia yang di laksanakan pada tahun 2023 yakni 14,1%. Jika dibanding dengan tahun 2023, prevalensi stunting pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 7% berdasarkan data survei SSGI 2024. Oleh karena data survei tahun 2025 belum diterbitkan, maka prevalensi stunting masih berdasarkan data survei SSGI 2024 yaitu sebesar 7% dengan target 6,65%.

Faktor pendorong keberhasilan penurunan prevalensi stunting antara lain:

- Peningkatan akses ke gizi yang memadai
- Peningkatan kualitas/mutu pelayanan Kesehatan
- Adanya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan stunting
- Peningkatan akses air bersih dan sanitasi
- Peningkatan kualitas Pendidikan
- Adanya dukungan lintas sektor dan masyarakat dalam pencegahan stunting
- Peningkatan ekonomi masyarakat yang berkontribusi pada perbaikan gizi Masyarakat.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor kurang gizi kronis yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting antara lain praktek pengasuhan

yang kurang baik termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan, Masih kurangnya akses rumah tangga/ keluarga ke makanan bergizi, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, dan faktor lain sebagainya. Beberapa kendala/permasalahan dalam upaya penurunan prevalensi stunting antara lain:

- a. Masih terdapat penduduk dengan akses gizi yang belum memadai terutama di daerah terpencil dan perbatasan
- b. Keterbatasan SDM kesehatan terutama tenaga nutrisisionis di fasilitas kesehatan
- c. Masih terdapat masyarakat kurang kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya gizi dan kesehatan
- d. Keterbatasan akses ke pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil dan perbatasan
- e. Masih terdapat permasalahan sanitasi dan lingkungan sehat
- f. Keterbatasan informasi Edukasi Kesehatan

Untuk mencegah angka stunting menjadi semakin tinggi perlu dilakukan upaya antara lain pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, pemantauan pertumbuhan dan kembangan balita, Pemberian ASI Eksklusif sampai umur 6 bulan dan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya, Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Strategi yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan Stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

- a) Pemberdayaan remaja, tokoh masyarakat, Ibu hamil, dan wanita usia subur dalam pencegahan stunting dengan Lomba Duta Pencegahan Stunting di setiap kecamatan dengan menyertakan seluruh siswi membuat video edukasi Gizi Seimbang dan Tablet Tambah Darah dalam pencegahan anemia pada remaja.
- b) Orientasi pemantauan tumbuh kembang dan pedoman gizi seimbang bagi kader, PAUD/TK/RA (Guru Paud)
- c) Edukasi dan implementasi Gizi seimbang di sekolah
- d) Diseminasi Publikasi Data Stunting Tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai penyebaran informasi sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan penurunan stunting.
- e) Pemberian Tatalaksana Intervensi Pencegahan dan Penanganan Kasus Gizi. Meliputi pemberian bantuan PDK dan PKMK bagi ibu hamil dan balita terdampak

kasus gizi selama 3 bulan untuk balita stunting se Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap
IKU Prevalensi Stunting Tahun 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub-kegiatan : Pengelolaan Pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	5.820.673.675	5.176.840.212	643.833.463	88,94%	11,06%
JUMLAH		5.820.673.675	5.176.840.212	643.833.463	88,94%	11,06%

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 5.820.673.675,00 untuk mendukung tercapainya IKU Prevalensi Stunting pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dan telah realisasi anggaran sebesar RP 5.176.840.212,00 atau 88,94% dengan Persentase efisiensi anggaran sebesar 11,06%.

3. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator derajat kesehatan nasional, disebut demikian karena jumlah kematian ibu menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan. Jumlah kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi IKU Jumlah Kematian Ibu Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2030
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Jumlah Kematian Ibu (orang)	4	5	3	4	4	9,00	4	155,55	8
	Rata-rata Capaian Kinerja								155,55	

Pada tabel 3.9 dapat diketahui bahwa jumlah kematian ibu tahun 2025 sebanyak 4 orang dari target kematian ibu sebanyak 9 orang sehingga capaian kinerja sebesar 155,55%, telah mencapai dan melebihi yang ditargetkan. Kasus kematian ibu pada tahun 2025 disebabkan oleh Eklamsia, perdarahan, *komplikasi non obstetric, maternal infection and parasitic diasese classifiable*.

Perbandingan jumlah kematian ibu dari tahun 2021-2025 cenderung fluktuatif. Jumlah kematian ibu yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 dan mengalami penurunan menjadi 3 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah kematian ibu meningkat lagi menjadi 4 kasus dan dalam 2 tahun terakhir (tahun 2024-2025) jumlah kasus kematian ibu menetap di 4 kasus kematian. Jumlah kematian Ibu termasuk indikator kinerja negative dimana semakin rendah realisasi kinerja, maka capaian kinerja semakin baik. Jadi, berdasarkan data pada tabel 3.9, walaupun realisasi kinerja jauh lebih rendah dari yang ditargetkan, kondisi ini menggambarkan bahwa untuk indikator kinerja jumlah kematian ibu telah berhasil tercapai karena yang diharapkan adalah jumlah kematian ibu yang rendah.

Faktor pendorong keberhasilan menurunkan Jumlah Kematian Ibu yaitu:

- Ketersediaan fasilitas kesehatan (Rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdes)
- Ketersediaan UKBM Posyandu
- Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar
- Kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak
- Ketersediaan Sumber daya manusia kesehatan
- Kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak

Adapun kendala/masalah dalam upaya menurunkan jumlah kematian ibu yaitu:

- a. Masih didapati masyarakat dengan akses pelayanan kesehatan sulit terutama di daerah terpencil dan perbatasan
- b. Sumber daya manusia yang masih kurang dan pengelola program KIA yang berganti
- c. Kemampuan dan kompetensi SDM kesehatan yang terbatas
- d. Masih terdapat fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar.
- e. Kurangnya kesadaran dan kemauan ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas Kesehatan
- f. Keterlambatan rujukan karena sistem yang kurang mendukung

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya menurunkan kasus kematian ibu antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan bergerak menjangkau masyarakat di daerah terpencil untuk kemudahan akses pelayanan Kesehatan
- b. Peningkatan kapasitas petugas pelayanan kesehatan dalam penanganan AKI
- c. Peningkatan fasilitas kesehatan yang sesuai standar (Pelayanan emergency kebidanan dan neonatal dasar (PONED) di Puskesmas dan komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit)
- d. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar di fasilitas Kesehatan
- e. Melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada Masyarakat
- f. Pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil 6 tangan (1 dokter, 1 bidan, 1 perawat atau 2 bidan, 1 perawat atau 3 bidan)
- g. Mengembangkan konsep Audit Maternal Perinatal
- h. Monitoring Evaluasi Program Kesehatan Keluarga
- i. Memantapkan pemberdayaan masyarakat

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 620.526.300,00 untuk mendukung tercapainya IKU Jumlah Kematian Ibu pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya penurunan jumlah kematian ibu adalah

sebesar RP 615.307.081,00 atau 99,27% dengan Persentase efisiensi anggaran sebesar 0,73% (dapat dilihat pada tabel 3.10)

**Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap
IKU Jumlah Kematian Ibu Tahun 2025**

No.	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub-kegiatan : Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu hamil	120.949.300	120.281.631	667.669	99,45%	0,55%
2	Sub-kegiatan : Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	499.577.000	495.025.450	4.551.550	99,09%	0,91%
JUMLAH		620.526.300	615.307.081	4.551.550	99,27%	0,73%

4. Jumlah Kematian Balita

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi IKU Jumlah Kematian Balita Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2030
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Jumlah Kematian Balita (orang)	45	39	37	33	30	94,00	29	169,14	87
Rata-rata Capaian Kinerja									169,14	

Jumlah kematian balita menjadi indikator baru pada renstra kesehatan. Jumlah kematian balita adalah jumlah kematian anak usia 0-59 bulan dalam satu tahun. Data kematian balita pada tahun 2025 adalah data kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari pada satu tahun tertentu yang bukan disebabkan

oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Dari data pada tabel 3.11 dapat dilihat bahwa target jumlah kematian balita pada tahun 2025 sebanyak 94 orang dan realisasi sebanyak 29 orang dengan rasio capaian sebesar 169,14%. Data ini menunjukkan bahwa jumlah kematian balita lebih rendah dari yang ditargetkan. Indikator jumlah kematian balita adalah indikator kinerja negative dimana apabila realisasi kinerja lebih rendah dari yang ditargetkan maka rasio capaian kinerja lebih bagus. Semakin rendah jumlah kematian balita maka kinerja Dinas Kesehatan untuk penurunan jumlah kematian balita semakin bagus.

Pada tahun 2025 terdapat sebanyak 29 kasus kematian neonatal disebabkan oleh asfiksia, premature, sepsis, respiratory diseases syndrom (RDS), dan BBLR. Berbagai program dan kegiatan pelayanan kesehatan terus dilakukan untuk menurunkan jumlah kematian balita. Jika dibandingkan jumlah kematian balita pada tahun 2021 sampai dengan 2025 (tabel 3.11), dapat dilihat bahwa jumlah kematian balita selama 4 (empat) tahun berturut-turut terus menurun. Pada tahun 2021 jumlah kematian balita sebanyak 39 orang, tahun 2022 menurun menjadi 37 orang, tahun 2023 menurun lagi menjadi sebanyak 33 orang dan terus menurun sampai tahun 2024 sebanyak 30 orang kematian balita.

Faktor pendorong keberhasilan penurunan jumlah kematian balita diantaranya:

- a. Pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya
- b. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar
- c. Kemudahan akses pelayanan Kesehatan
- d. Ketersediaan SDM Kesehatan
- e. Adanya Kerjasama lintas sektor dan lintas program
- f. Ketersediaan dan Keaktifan UKBM Posyandu

Adapun kendala/masalah dalam upaya menurunkan jumlah kematian balita yaitu:

- a. Masih didapati masyarakat dengan akses pelayanan kesehatan sulit terutama di daerah terpencil dan perbatasan
- b. Kemampuan dan kompetensi petugas pelayanan kesehatan yang terbatas
- c. Masih terdapat fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar.

- d. Masih didapati masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan dan persalinan di fasilitas kesehatan.
- e. Keterlambatan rujukan karena system rujukan yang kurang mendukung

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya menurunkan kasus kematian balita antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan bergerak menjangkau masyarakat di daerah terpencil untuk kemudahan akses pelayanan Kesehatan
- b. Peningkatan kapasitas petugas pelayanan kesehatan dalam penanganan AKI
- c. Peningkatan fasilitas kesehatan yang sesuai standar (Pelayanan emergency kebidanan dan neonatal dasar (PONED) di Puskesmas dan komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit)
- d. Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar di fasilitas Kesehatan
- e. Melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada masyarakat
- f. Pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil 6 tangan (1 dokter, 1 bidan, 1 perawat atau 2 bidan, 1 perawat atau 3 bidan)
- g. Mengembangkan konsep Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMPSR)
- h. Pelaksanaan tatalaksana dan intervensi skrinning bayi baru lahir khususnya SHK, S-HAK dan S-G6PD
- i. Melaksanakan KIE kepada Masyarakat
- j. Memantapkan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 164.755.497,00 untuk mendukung tercapainya IKU Jumlah Kematian Ibu pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya penurunan jumlah kematian balita adalah sebesar RP 164.500.470,00 atau 99,91% dengan Persentase efisiensi anggaran sebesar 0,09% (dapat dilihat pada tabel 3.12).

**Tabel 3.12. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap
Indikator Jumlah Kematian Balita Tahun 2025**

No.	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	Sub-kegiatan : Pengelolaan Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	139.800.697	139.545.670	255.027	99,82%	0,18%
2	Sub-kegiatan : Pengelolaan Pelayanan kesehatan Balita	24.954.800	24.954.800	0	100,00%	0,00%
JUMLAH		164.755.497	164.500.470	255.027	99,91%	0,09%

5. Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

**Tabel 3.13 Capaian IKU Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2030
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	0	36	16,19	44,97%	70

Program Pemeriksaan kesehatan Gratis merupakan program *quick win* Presiden yang dilaksanakan di Puskesmas, Sekolah dan Klinik dan merupakan kegiatan prioritas RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029. Adapun indikator Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis adalah Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Oleh karena indikator ini merupakan indikator baru RPJMN dan RPJMD tahun 2025

2029, jadi untuk perbandingan data capaian program dari tahun ke tahun belum tersedia.

Program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup, dimulai sejak bayi baru lahir hingga lanjut usia. Pendekatan ini difokuskan pada upaya promotive dan preventif yang bersifat holistic, terintegrasi dan berbasis sasaran kelompok. PKG ditujukan untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit dan penyakit dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan usia harapan hidup masyarakat. PKG diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan kesehatan melalui penyediaan layanan skrining sesuai siklus hidup. PKG diberikan kepada kelompok sasaran dengan berbagai cara yaitu:

1. PKG Ulang tahun ditujukan kepada bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak prasekolah) dan bagi usia 18 tahun ke atas (dewasa dan lanjut usia)
2. PKG sekolah ditujukan bagi anak usia 7-17 tahun (usia sekolah dan remaja) yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru
3. PKG khusus ditujukan bagi ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak pra sekolah) meliputi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan ibu dan anak

Berdasarkan data pada tabel 3.13, target PKG pada tahun 2025 sebesar 36% dan realisasi 16,19% dengan capaian kinerja sebesar 44,97%. Faktor pendorong PKG dapat dilaksanakan walaupun mulai dikerjakan pada triwulan III tahun 2025 yaitu

1. Ketersediaan fasilitas kesehatan 16 puskesmas
2. ketersediaan SDM kesehatan
3. Ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan
4. Adanya Teknologi kesehatan melalui aplikasi SATUSEHAT yang memudahkan masyarakat akses administrasi dan informasi kesehatan
5. Adanya partisipasi masyarakat

Walaupun PKG telah dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025, namun pelaksanaan Program PKG belum sepenuhnya lancar. Adapun kendala yang ditemui pada pelaksanaan PKG yaitu

1. PKG merupakan indikator baru sehingga pada masa transisi RPJMN pelaksanaan kegiatan masih terfokus pada sosialisasi juknis pelaksanaan PKG untuk meningkatkan pemahaman petugas terkait teknis pelaksanaan layanan PKG.
2. Program PKG belum terpublikasi secara luas ke masyarakat.

3. Keterbatasan petugas dalam pengelolaan sistem informasi pelaporan PKG di Puskesmas
4. Kondisi aplikasi ASIK (Aplikasi Sehat IndonesKu) yang sulit diakses
5. Masyarakat banyak yang belum mengaktifkan Satu Sehat Mobile
6. Partisipasi masyarakat yang masih rendah

Strategi yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan dan peningkatan Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai berikut

1. Mengoptimalkan fasilitas kesehatan dapat dengan menyediakan ruang khusus PKG
2. Penguatan SDM Kesehatan melalui pelatihan singkat terkait pelaksanaan PKG dan Pemanfaatan teknologi informasi pelaporan PKG
3. Melakukan sosialisasi PKG ke masyarakat
4. Melakukan pendampingan aktivasi Satu Sehat Mobile ke masyarakat
5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala program PKG

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 123.763.800,00 untuk mendukung tercapainya IKU Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif dan Pengelolaan Kesehatan Pada Usia Lanjut . Adapun realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis adalah sebesar RP 121.414.750,00 atau 99,58% dengan persentase efisiensi anggaran sebesar 0,42% (dapat dilihat pada tabel 3.14).

Tabel 3.14. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	Sub-kegiatan : Pengelolaan Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	139.800.697	139.545.670	255.027	99,82%	0,18%
2	Sub-kegiatan : Pengelolaan Pelayanan kesehatan Balita	24.954.800	24.954.800	0	100,00%	0,00%
3	Sub-kegiatan : Pengelolaan Pelayanan kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	24.184.800	24.184.800	0	100,00%	0,00%
4	Sub-kegiatan : Pengelolaan Pelayanan kesehatan Pada Usia Produktif	170.667.300	170.660.000	7.300	100,00%	0,00%
5	Sub-kegiatan : Pengelolaan Pelayanan kesehatan Usia Lanjut	123.763.800	121.414.750	2.349.050	98,10%	1,90%
JUMLAH		123.763.800	121.414.750	2.349.050	99,58%	0,42%

6. Cakupan Imunisasi bayi lengkap

Tabel 3.15 Perbandingan realisasi IKU Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap
Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2030
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	80,5	76,9	93,3	96,27	80,5	81,00	80	98,77	95
	Rata-rata Capaian Kinerja								98,77	

Imunisasi dasar lengkap terdiri dari 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB dan atau DPT-HB-Hib, 4 dosis polio dan 1 dosis campak. Pada tahun 2025 target cakupan imunisasi bayi lengkap adalah sebesar 81% dan telah realisasi sebesar 80% dengan capaian kinerja sebesar 98,77%. Untuk menilai keberhasilan imunisasi yaitu *Universal*

Child Immunization (UCI) desa/kelurahan. Desa atau Kelurahan *UCI (Universal Child Immunization) (UCI)* adalah desa/kelurahan dimana 85% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 13 kecamatan, 20 kelurahan dan 134 desa. Dari seluruh desa/kelurahan sebanyak 93,30% desa/Kelurahan sudah melaksanakan UCI pada tahun 2025. Masih terdapat 1,70% desa/kelurahan belum UCI.

Jika dilihat pada tabel 3.13, didapat informasi bahwa cakupan imunisasi bayi lengkap mengalami fluktuatif. Dimana cakupan tertinggi berada pada tahun 2023 sebanyak 96,27% dan paling rendah cakupan imunisasi bayi lengkap berada di tahun 2021 yaitu sebesar 76,9%. Pada tahun 2025, cakupan imunisasi bayi lengkap sebesar 80% dari target 81% dengan capaian kinerja sebesar 98,77%.

Faktor pendorong keberhasilan mencapai Cakupan imunisasi bayi lengkap antara lain:

- a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi
- b. Adanya dukungan sumber daya sarana, prasarana imunisasi
- c. Ketersediaan vaksin
- d. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
- e. Dukungan dan Kerjasama Lintas sektor dan lintas program
- f. Dukungan UKBM Posyandu ILP
- g. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan tentang program desa UCI
- h. Adanya pengawasan dan evaluasi yang efektif secara berkala untuk memantau kemajuan program Imunisasi bayi lengkap baik pelaporan online dan offline
- i. Adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kualitas dan kuantitas pelaksanaan imunisasi melalui Pelaksanaan surveilans PD3I yang terjadwal dan pengulangan kejadian ikutan pasca iminisasi.

Kendala/permasalahan dalam upaya meningkatkan Cakupan imunisasi bayi lengkap adalah

- a. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil dan perbatasan
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti imunisasi
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya imunisasi
- d. Terbatasnya tenaga pelaksana imunisasi yang kompeten

- e. Kurangnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi

Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase desa/kelurahan UCI antara lain:

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil dengan membentuk UKBM Posyandu dan peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan melalui Program integrasi layanan primer
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi pentingnya imunisasi
- c. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dengan pelatihan
- d. Meningkatkan Kerjasama lintas sektor dan lintas program
- e. Meningkatkan monitoring dan evaluasi berkala untuk memantau kemajuan Program Imunisasi bayi lengkap.

3.16 . Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Cakupan Imunisas Bayi Lengkap Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub-kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan	130.232.800	128.769.000	1.463.800	98,88%	1,12%
JUMLAH		130.232.800	128.769.000	1.463.800	98,88%	1,12%

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 130.232.800,00 untuk mendukung tercapainya IKU Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap pada Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan . Adapun realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target cakupan

Imunisasi Bayi lengkap adalah sebesar RP 128.232.800,00 atau 98,88% dengan persentase efisiensi anggaran sebesar 1,12%.

7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Yang Aktif

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi IKU Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Yang Aktif Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2030
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan yang Aktif	74,45	73,32	73,74	60,23	74,45	80	82	102,50%	83,75
Rata-rata Capaian Kinerja									102,50%	

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Alasan utama penggunaan Jaminan Kesehatan yakni dapat menanggulangi biaya kesehatan secara cepat saat terjadi darurat medis. Belum lagi dengan fakta bahwa biaya kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan namun khusus yang belum memiliki Jaminan Kesehatan atau belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Pemerintah Tanjung Jabung Barat Memiliki Kebijakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Peserta akan didaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah satu wilayah yang berada di provinsi Jambi yang telah mencapai predikat *Universal Health Coverage*. Peserta jaminan kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun yang terdaftar sebanyak 339.043 jiwa berdasarkan jumlah penduduk semester 1 tahun 2025 yaitu 339.758, dengan capaian peserta JKN 99,79%. Dari data peserta jaminan kesehatan, jumlah penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 227.196 jiwa (67,96% dari total penduduk) yang terdiri dari PBI APBN sebanyak 139.971 jiwa (41,87%) dan PBI PBPU/BP PEMDA sebanyak

87.225 jiwa (26,09%). Sedangkan peserta jaminan kesehatan Non PBI sebanyak 111.149 jiwa (33,25% dari jumlah penduduk).

Dari tabel 3.15 didapatkan informasi bahwa pada tahun 2021 cakupan kepesertaan jaminan kesehatan aktif sebesar 73,32% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 73,74%, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 60,23%. Kemudian pada tahun 2024, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan aktif meningkat Kembali menjadi sebesar 74,45% dan terus mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2025 menjadi sebesar 82% dari target 80% dengan capaian kinerja sebesar 102,50%. Dari data dapat disimpulkan bahwa Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang aktif telah mencapai bahkan melebihi dari yang ditargetkan.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang aktif yaitu:

- a. Ketersediaan fasilitas Kesehatan yang terdiri dari 16 puskesmas, 2 RSUD, dan 76 Pustu
- b. Pemenuhan sarana prasarana Kesehatan sesuai standar secara bertahap di fasilitas kesehatan
- c. Pemenuhan dan distribusi sumber daya manusia bidang Kesehatan,
- d. Koordinasi yang baik dengan OPD dan Lintas sektor terkait (Pemda, Dinsos, Dukcapil, BPJS kesehatan)
- e. Kerjasama yang baik mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten,
- f. Peran swasta/stakeholder bidang Kesehatan (Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, Klinik Kesehatan)

Kendala/masalah yang dihadapi dalam mencapai target kinerja indikator cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang aktif yaitu :

- a. Masih terdapat kepesertaan jaminan kesehatan nonaktif
- b. Masih adanya Masyarakat yang akan didaftarkan belum rekam E-KTP, NIK tidak online dan juga belum update KK
- c. Masih terdapat Masyarakat diluar Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merubah KK menjadi Domisili Tanjung Jabung Barat untuk didaftarkan menjadi peserta UHC
- d. Masih terdapat dalam satu keluarga kepesertaan JKN nya berbeda segmen

- e. Masih terdapat masyarakat dengan akses pelayanan Kesehatan sulit terutama di daerah terpencil dan perbatasan

Adapun strategi pemecahan masalah yang dapat diambil untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan aktif adalah

- a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam upaya peningkatan kepesertaan dan keaktifan program jaminan kesehatan
- b. Meningkatkan akses dan ketersediaan pelayanan Kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan
- c. Optimalisasi program pesiar (Petakan, Sisir, advokasi dan registrasi) dan program srikandi (Senergi Rekrutmen Reaktivasi Peserta JKN melalui Pemerintah Daerah dengan pemerintah melalui penggunaan dana Corporate Social responsibility (CSR)
- d. Reaktivasi keluarga tambahan dengan manfaat 1% anggota keluarga tambahan
- e. Verifikasi dan validasi dana penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK)
- f. Masyarakat proaktif mengecek kepesertaan ke desa melalui SIK-NG untuk didaftarkan ke PBI APBN

Tabel 3.18 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan yang Aktif Tahun 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub-kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	32.478.433.400	31.700.431.200	778.002.200	97,60%	2,40%
JUMLAH		32.478.433.400	31.700.431.200	778.002.200	97,60%	2,40%

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 32.478.433.400,00 untuk mendukung tercapainya IKU Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan yang Aktif pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Adapun realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan yang aktif adalah sebesar RP 31.700.431.200,00 atau 97,60% dengan Persentase efisiensi anggaran sebesar 2,40%.

8. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC

Tabel 3.19 Perbandingan realisasi IKU Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2030
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis	89.22	89.23	90.00	86.68	89.22	90,00	87,35	97,06	90
Rata-rata Capaian Kinerja									97,06	

Angka keberhasilan pengobatan TBC atau *Success Rate (SR) TBC* merupakan indikator pengobatan penderita yang sembuh maupun pengobatan lengkap yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan penderita TBC. Keberhasilan pengobatan penderita TBC dipengaruhi beberapa faktor yang meliputi faktor medis dan non-medis. Faktor medis meliputi : keluhan pertama sebelum pengobatan, penyakit penyerta, efek samping dan retensi obat, sedangkan faktor nonmedis meliputi: umur, jenis pekerjaan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), sikap petugas kesehatan, kemudahan jangkauan berobat, Pengawas Menelan Obat (PMO) dan keteraturan minum obat.

Pada tabel 3.17 dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 target *success rate TBC* sebesar 100% dan realisasi sebesar 87,35% dengan rasio capaian kinerja sebesar 87,35%. Jika dibandingkan target dan realisasinya, maka dapat dilihat bahwa *success rate* belum mencapai target pada tahun 2025. Masih terdapat kekurangan *success rate TBC* sebesar 12,65% dari target 100%.

Jika dilihat data pada tabel 3.17 perbandingan capaian *success rate TBC* dari tahun 2021 sampai dengan 2025 terlihat fluktuatif. Dimana pada tahun 2021 realisasi *success rate TBC* sebesar 89,23% dari target 100%, pada tahun 2022 *Success Rate TBC* mengalami peningkatan kembali mencapai 90% dari target 100%, pada hasil

tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 86,68% dari target 100%, pada tahun 2024 realisasi *success rate TBC* mengalami peningkatan menjadi 89,22% dari target 100% dan pada tahun 2025 *sukses rate TBC* mengalami penurunan menjadi 87,35%.

Walaupun *sukses rate TBC* mengalami penurunan pada tahun 2025, namun pencapaian temuan kasus meningkat dibanding tahun 2023 dan 2024. Dimana tahun 2023 Kabupaten berhasil menemukan 48,55%. Tahun 2024 menemukan kasus sebesar 58,40% dan tahun 2025 menemukan kasus sebesar 63,05%. Dari angka temuan kasus, kegiatan Aktif TBC ke kelompok Masyarakat di Kabupaten semakin baik dari tahun ke tahun sehingga menemukan kasus dengan tingkat keparahan atau *Severity of illness (SOI)* yang berbeda-beda, dengan kata lain kondisi apakah pasien dapat disembuhkan dengan OAT selama 6 bulan atau gagal dan meninggal saat pengobatan berjalan dimana kondisi ini menurunkan Angka Keberhasilan Pengobatan TBC/*Success rate* dalam Program TBC.

Beberapa Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Angka keberhasilan pengobatan TBC/*success rate TBC* yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan investigasi kontak TBC
2. Tersedia tenaga yang terlatih TBC di fasilitas kesehatan
3. Penerapan strategi DOTS
4. Monitoring dan evaluasi rutin program pelayanan TBC
5. Terdapat Kader terlatih TBC
6. PMO yang mendukung Pengobatan Pasien

Beberapa Kendala yang dapat mempengaruhi upaya meningkatkan pencapaian Angka keberhasilan pengobatan TBC/*success rate TBC* yaitu:

1. Ketidakpatuhan pasien minum obat karena kurangnya dukungan PMO
2. Adanya efek samping obat sehingga menyebabkan pasien tidak mau minum obat dan tidak berkunjung ke layanan untuk lanjut pengobatan
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan penyakit TBC, seperti memeriksakan diri saat ada gejala TBC.
4. Kurang pengetahuan dan kesadaran pasien yang telah berobat untuk menyelesaikan pengobatan sampai tuntas.
5. Pasien TBC dengan tingkat keparahan sehingga gagal pengobatan dan meninggal dimasa pengobatan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Angka keberhasilan pengobatan TBC/ *success rate* TBC yaitu

1. Peningkatan akses layanan masyarakat melalui Meningkatkan penemuan kasus TBC di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memberdayakan Pos TBC sebanyak 12 unit. Yang tersebar di 6 Puskesmas yaitu Puskesmas Teluk Nilau (3 Pos TBC), Puskesmas Senyerang (2 Pos TBC), Puskesmas Suban (2 Pos TBC), Puskesmas Lubuk Kambing (3 Pos TBC), Puskesmas Sungai Saren (1 Pos TBC) dan Puskesmas Kuala tungkal I (1 Pos TBC).
2. Pelatihan TBC untuk SDM Kesehatan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan dalam PMO (Pengawas Minum Obat)
4. Melaksanakan KIE untuk pemahaman pengobatan TBC kepada pasien TBC dan masyarakat.

Tabel 3.20 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub-kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	585.694.100	584.366.530	1.327.570	99,77%	0,23%
JUMLAH		585.694.100	584.366.530	1.327.570	99,77%	0,23%

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 585.694.100,00 untuk mendukung tercapainya IKU Angka Keberhasilan Pengobatan TBC pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB. Adapun realisasi anggaran yang mendukung

tercapainya target Angka Keberhasilan Pengobatan TBC adalah sebesar RP 584.366.530,00 atau 99,77% dengan Persentase efisiensi anggaran sebesar 0,23%.

9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2030
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Penderita Hipertensi Yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	33,73	25,12	26,80	36,99	33,73	100,00	56,22	56,22	100
Rata-rata Capaian Kinerja									56,22	

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Hipertensi disebabkan oleh dua kelompok faktor risiko utama: yang dapat diubah (gaya hidup) seperti obesitas, merokok, konsumsi garam/alkohol berlebih, kurang aktivitas fisik, dan stres, serta yang tidak dapat diubah (genetik/biologis) meliputi faktor usia (terutama >60 tahun), jenis kelamin, dan riwayat keluarga atau keturunan.

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Prevalensi Hipertensi pada tahun 2025 sebesar 24,65%. Sedangkan Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 56,22% (tabel 3.19). Jika dilihat perbandingan persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 terlihat bahwa persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan terus meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025, persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kembali meningkat.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar pada penderita hipertensi ditemui berbagai kendala antara lain:

1. Faktor akses pelayanan sehingga minat dan partisipasi masyarakat untuk datang masih rendah ke fasilitas kesehatan, dan salah satu penyebabnya kurang pengetahuan, beranggapan sehat, serta keterbatasan waktu karena kelompok usia produktif disibukkan dg pekerjaan atau kegiatan ekonomi sehingga sulit meluangkan waktu, dan masyarakat remaja yang sedang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi tidak dapat terskrining,
2. Belum maksimalnya dan meratanya pelaksanaan Posyandu ILP / Posbindu PTM masih ada yang jauh dari jangkauan masyarakat, dan masih perlu penambahan sehingga masyarakat melakukan skrining di puskesmas saat ada keluhan.
3. Kurangnya minat masyarakat untuk datang ke Posyandu ILP / posbindu PTM, salah satu alasannya karena takut mengetahui akan hasil pemeriksaan.
4. Saat kegiatan skrining dilaksanakan peserta yang hadir hanya itu – itu saja serta masih banyak ditemukan yang tidak membawa KTP/KK
5. Sistem informasi manajemen puskesmasn (SIMPUS) tidak terintegrasi di SEHATINDONESIAKU (ASIK) sehingga data tidak tervalidasi karena penanggung jawab yang berbeda, dengan dua sistem pelaporan yang berbeda, bahkan ASIK sering maintance dan gangguan menyebabkan Laporan tidak tepat waktu, banyak inputan yang tidak lengkap per item pemeriksaan bahkan banyak data tidak sinkron (Nik, Nama dan Tanggal Lahir tidak terbaca di sehat indonesia) menyebabkan kesenjangan akan perbedaan data manual dan di aplikasi.
6. Masih rendahnya kuantitas pelaksanaan promosi kesehatan, metode sosialisasi dan edukasi yang kurang kreatif dan menarik menyebabkan pesan pentingnya tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
7. Kurangnya partisipasi / Kerjasama Lintas Sektor, Lintas Program, dan Jejaring diwilayah kerja Puskesmas
8. Kurangnya SDM, Dana dan Prasarana untuk penginputan laporan di Sehat Indonesia (ASIK)

Strategi yang dapat dilakukan untuk menurunkan prevalensi hipertensi yaitu:

1. Pada tahun 2025 upaya Dinas Kesehatan dalam menurunkan Prevalensi Hipertensi sudah melakukan beberapa kegiatan seperti Skrining Penyakit Tidak Menular di Instansi – instansi formal, institusi pendidikan, event–event tertentu, dan kunjungan kerumah–rumah penduduk.

2. Melakukan advokasi ulang ke lintas sektor terkait, lintas program, dan jejaring diwilayah kerja puskesmas
3. Memaksimalkan kegiatan Posyandu ILP / Posbindu PTM dengan mendatangkan suatu perkumpulan masyarakat (pengajian, hajatan),
4. Meningkatkan media KIE bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, membuat penyuluhan, melaksanakan posbindu mobile ke rt-rt, membuat inovasi Skrining PTM ditempat keramaian (pasar tradisional), serta memaksimalkan skrining PTM ke instansi pemerintah diwilayah kerja,
5. Kegiatan dilakukan dan terintegrasi dengan kegiatan program lain, serta dengan jejaring dan jaringan wilayah kerja puskesmas
6. Menambah Posyandu ILP/Posbindu PTM, sehingga setiap desa memiliki 1 atau 2 posbindu sesuai dengan keadaan wilayah dan jumlah penduduk,
7. Dapat mengusulkan kegiatan program PTM di Rencana usulan kinerja (RUK) Puskesmas
8. Memaksimalkan penginputan data PTM di ASIK dengan membuat tim penginput

Tabel 3.22 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub-kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	36.252.600	36.238.400	14.200	99,96%	0,04%
JUMLAH		36.252.600	36.238.400	14.200	99,96%	0,04%

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 36.252.600,00 untuk mendukung tercapainya IKU Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Adapun realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar adalah sebesar RP 36.238.400,00 atau 99,96% dengan Persentase efisiensi anggaran sebesar 0,04%. Data efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel 3.20.

c. SASARAN III : Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan akses sumber daya kesehatan

10. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi

Tabel 3.23 Capaian IKU Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2030
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi	2,75	2,75	2,02	2,75	2,75	5,40	2,75	50,93	5,6
Rata-rata Capaian Kinerja									50,93	

Sumber daya manusia Kesehatan merupakan komponen yang sangat penting dalam pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan tidak dapat berfungsi tanpa dukungan tenaga Kesehatan yang memadai. Ketersediaan tenaga Kesehatan yang memadai berkorelasi positif dengan kemudahan akses layanan Kesehatan sampai ke pelosok desa.

Perencanaan dan distribusi tenaga Kesehatan secara teknis memastikan bahwa jumlah tenaga Kesehatan tersedia dalam wilayah tertentu sesuai kebutuhan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat, memiliki keterampilan yang sesuai standar kompetensi dan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rasio tenaga medis dan tenaga Kesehatan terhadap penduduk sebagai indikator untuk memproyeksikan kebutuhan

tenaga Kesehatan. Indikator tersebut untuk memastikan ketersediaan dan distribusi yang merata dari tenaga dokter, perawat dan bidan di setiap daerah.

Menurut WHO standar minimum rasio tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) sebesar 4,4 tenaga Kesehatan per 1.000 penduduk. Saat ini Indonesia memiliki rasio sekitar 4 tenaga Kesehatan per 1.000 penduduk dan masih berada dibawah standar global. Target kementerian Kesehatan untuk rasio tenaga medis dan tenaga Kesehatan pada tahun 2025 adalah sebesar 5,3 tenaga Kesehatan per 1.000 penduduk. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki rasio sekitar 2,75 tenaga Kesehatan per 1.000 penduduk pada tahun 2025 dan masih berada dibawah target.

Perencanaan dan distribusi tenaga medis dan tenaga Kesehatan terus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang berkompeten. Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pemenuhan dan pemerataan tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Membuat rencana kebutuhan tenaga medis dan tenaga Kesehatan
2. Melakukan pemutakhiran data tenaga Kesehatan untuk memetakan distribusi tenaga Kesehatan
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi salah satu tujuan program internship dokter dan dokter gigi dari kementerian Kesehatan yang menempatkan dokter dan dokter gigi di Rumah Sakit dan Puskesmas dalam jangka waktu tertentu.
4. Rekrutmen tenaga Kesehatan formasi PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu
5. Aktivasi SISDMK SATU SEHAT sebagai platform digital terpusat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengelola data tenaga ,medis dan tenaga Kesehatan secara terintegrasi
6. Untuk pemenuhan tenaga Kesehatan yang bermutu dan berkompeten dilakukan pelatihan-pelatihan Kesehatan

Kendala dalam pemenuhan tenaga medis dan tenaga Kesehatan adalah

1. Kurangnya minat pelamar terutama tenaga medis untuk penempatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Distribusi tenaga Kesehatan yang tidak merata (banyak tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang lebih memilih bekerja di kota daripada di desa)
3. Keterbatasan fasilitas Kesehatan di pedesaan baik sarana prasarana sehingga tenaga Kesehatan enggan untuk ditempatkan didesa

4. Adanya kesenjangan kompetensi karena program-program peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan belum menjangkau semua tenaga Kesehatan di lapangan

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang bermutu antara lain:

1. Mapping tenaga kesehatan per kecamatan
2. Rekrutmen tenaga Kesehatan baik skema penerimaan PNS dan PPPK
3. Tambahan tunjangan tenaga Kesehatan di daerah terpencil
4. Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan melalui tugas belajar, pelatihan dan workshop
5. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pemenuhan tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 4.6619.520.000,00 untuk mendukung tercapainya IKU Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Per 1000 Penduduk) pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar. Adapun realisasi anggaran yang mendukung tercapainya target Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Per 1000 penduduk) adalah sebesar RP 4.247.593.900,00 atau 95,79% dengan Persentase efisiensi anggaran sebesar 4,21% (dapat dilihat pada tabel 3.22).

Tabel 3.24 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					

	Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota					
1	Sub-kegiatan : Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Kesehatan	203.220.800	203.213.900	6.900	100,00%	0,00%
2	Sub-Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	4.416.300.00 0	4.044.380.000	371.920.000	91,58%	8,42%
JUMLAH		4.619.520.80 0	4.247.593.900	6.900	95,79%	4,21%

d. SASARAN IV : Meningkatnya pengendalian penyakit melalui upaya pembudayaan hidup sehat

11. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup

Tabel 3.25. Capaian IKU Proporsi Penduduk Dengan Aktifitas Fisik CUKUP Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Proporsi Penduduk Dengan Aktifitas Fisik Cukup	0	65,00	0	0,00	80
Rata-rata Capaian Kinerja					0,00	

Indikator Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup adalah persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (>150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia >10 tahun pada jangka waktu yang sama. Data survei kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa 37,4% penduduk Indonesia berusia diatas 10 tahun kurang melakukan aktivitas fisik. Alasan kurang aktivitas fisik adalah tidak ada waktu (48,7%), malas (32,6%), lanjut usia (19,5%) dan tidak ada rekan (9,85%).

Indikator Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup merupakan indikator baru RPJMN 2025-2029 dan telah diselaraskan dengan RPJMD 2025-2029

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Data proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup tahun 2025 belum didapatkan karena data tersebut dapat diperoleh dari data survei oleh kementrian kesehatan. Data survei tahun 2025 belum dipublish sampai saat ini.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup, antara lain

1. Melakukan promosi kesehatan baik melalui langsung ke masyarakat maupun melalui media sosial oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas
2. Bekerjasama dengan UKBM Posyandu untuk kampanye GERMAS
3. Kegiatan senam prolanis rutin di fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia atau penderita penyakit kronis (hipertensi, diabetes mellitus)

Adapun yang menjadi hambatan dalam meningkatkan proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup adalah

1. Kesadaran penduduk yang kurang akan hidup sehat (penduduk malas/tidak termotivasi melakukan aktivitas fisik)
2. Pengetahuan penduduk akan manfaat kesehatan dengan beraktivitas fisik cukup
3. Keterbatasan waktu bagi penduduk produktif untuk melakukan aktivitas fisik
4. Perubahan gaya hidup dimana saat ini masyarakat lebih banyak beraktivitas didepan layar televisi, gadget, komputer.
5. Keterbatasan fasilitas publik yang mendukung program peningkatan proporsi penduduk dengan aktivitas fisik

Untuk meningkatkan proporsi penduduk yang melakukan aktivitas fisik cukup, ada sejumlah faktor pendukung yang bisa menjadi pendorong keberhasilan yaitu

1. Meningkatkan Kampanye GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
2. memanfaatkan media informasi platform digital sebagai media KIE ke masyarakat untuk promosi pentingnya aktivitas fisik rutin
3. Meningkatkan Kerjasama lintas sektor untuk berperan dalam penggerakan masyarakat rutin berolahraga
4. Peran Pemda maupun lintas sektor dalam penyediaan fasilitas publik yang mendorong dan memudahkan masyarakat untuk beraktivitas fisik.
5. Pemberdayaan masyarakat terutama kader kesehatan sebagai penggerak masyarakat rutin olahraga terutama di desa dan wilayah terpencil

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 90.000.000,00 untuk mendukung tercapainya IKU Proporsi Penduduk Dengan Aktifitas Fisik Cukup pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat. Adapun realisasi anggaran yang mendukung IKU Proporsi Penduduk Dengan Aktifitas Fisik Cukup adalah sebesar RP 87.512.400,00 atau 97,24% dengan Persentase efisiensi anggaran sebesar 2,76%

Tabel 3.26. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Proporsi Penduduk Dengan Aktifitas Fisik Cukup Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kegiatan: Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota Sub-kegiatan : Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	90.000.000	87.512.400	2.487.600	97,24%	2,76%
JUMLAH		90.000.000	87.512.400	2.487.600	97,24%	2,76%

e. SASARAN V : Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan publik

12. Nilai Kepuasan Masyarakat

Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi IKU Nilai Kepuasan Masyarakat
Tahun 2021- 2025

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2030
			2021	2022	2023	2024	Target	realisasi	% Capaian	
1	Nilai Kepuasan Masyarakat	88,22	81,01	83,47	85,00	88,22	84	88,14	104,93	88,75
Rata-rata Capaian Kinerja									104,93	

Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan dari tahun ke tahun terus meningkat berdasarkan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2021 realisasi Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 81,01 kategori B (Baik), tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 83,47 kategori B (baik), dan tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 85,00 kategori B (Baik). Pada tahun 2024 Nilai Kepuasan masyarakat meningkat menjadi sebesar 87,68 kategori B (Baik) dan telah melebihi dari yang ditargetkan sebesar 83,50 dengan capaian kinerja sebesar 105,01% dan pada tahun 2025, nilai kepuasan masyarakat terus mengalami peningkatan menjadi 88,14 dari target 84 dengan capaian kinerja 104,93%.

Keberhasilan peningkatan Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan tentunya tidak lepas dari adanya komitmen pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan unit pelaksana teknisnya untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan yang terus menerus. Faktor pendorong meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan sebagai berikut:

- Ketersediaan fasilitas pelayanan Kesehatan 16 puskesmas, 2 RSUD dan 76 pusku
- Kemudahan akses pelayanan Kesehatan
- Ketersediaan informasi jenis layanan, persyaratan, waktu dan tarif pelayanan Kesehatan yang jelas serta mudah diakses oleh masyarakat baik melalui media online (media sosial faskes, website, nomor kontak faskes dan media offline berupa brosur, leaflet dll)
- Prosedur pelayanan Kesehatan yang mudah dan jelas di fasilitas pelayanan Kesehatan
- Ketersediaan sarana prasarana dan alat Kesehatan

- f. Ketersediaan sarana pengaduan di fasilitas Kesehatan dengan prosedur yang jelas baik pengaduan secara langsung maupun tidak langsung (media whatsapp, email, media sosial)
- g. Perilaku petugas pelaksana pelayanan Kesehatan yang memberikan suasana nyaman pada masyarakat, tidak diskriminasi, melayani pasien sesuai antrian dan bersikap ramah dalam melayani pasien
- h. Kolaborasi pelayanan Kesehatan antara fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah dengan UKBM dan pihak swasta (Praktik mandiri tenaga Kesehatan, klinik swasta dll)

Selain faktor-faktor pendorong meningkatnya nilai kepuasan masyarakat, didapati juga faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan, diantaranya:

- a. Respon pelanggan/masyarakat dalam pengisian kuesioner survei masih kurang
- b. Belum semua fasilitas Kesehatan memiliki Sumber daya manusia, sarana prasarana dan alat Kesehatan sesuai standar

Nilai kepuasan masyarakat akan meningkat jika mutu pelayanan kesehatan meningkat. Untuk itu, hambatan dalam peningkatan Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan harus diupayakan diatasi. Adapun solusi yang dapat disampaikan untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

1. Sosialisasi kepada masyarakat sebagai penerima layanan untuk pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat sebagai upaya untuk evaluasi pelayanan dan perbaikan pelayanan yang terus menerus
2. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan alat Kesehatan secara bertahap untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan dan non Kesehatan di fasilitas Kesehatan.

Tabel 3.28 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	17.505.538.171	14.773.173.636	2.732.364.535	84,39%	15,61%
JUMLAH		17.505.538.171	14.773.173.636	2.732.364.535	84,39%	15,61%

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 17.505.538.171,00 untuk mendukung tercapainya IKU Nilai Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Adapun realisasi anggaran yang mendukung IKU Nilai Kepuasan Masyarakat adalah sebesar RP 14.773.173.636,00 atau 84,39% dengan Persentase efisiensi anggaran sebesar 15,61%.

13. Nilai AKIP OPD

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi IKU Nilai AKIP OPD Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2024	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai AKIP OPD	78,04	60,5	74,31	76,05	78,04	78,00	80,03	102,60	82
	Rata-rata Capaian Kinerja								102,60	

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai SAKIP ditargetkan sebesar 78 pada tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh nilai sebesar 80,03 (tabel 3.27) dengan predikat A yang berarti bahwa kinerja Dinas Kesehatan Memuaskan. Data tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang terdiri dari Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi kinerja dan Pencapaian kinerja.

Jika dibandingkan Nilai SAKIP pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 3.27 bahwa setiap tahun terjadi peningkatan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan. Pada tahun 2021 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan sebesar 60,5 kategori C dari target 60,05 dan telah mencapai target. Pada tahun 2022 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan sebesar 74,31% dari target 62,25. Pada tahun 2023 adanya peningkatan nilai SAKIP menjadi 76,05%, dengan Inteprestasi BAIK, pada tahun 2024 Nilai Sakip Dinas Kesehatan meningkat lagi menjadi 78,04 dengan intrepetasi BB. Pada tahun 2025, laporan hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan mendapatkan nilai 80,03 dengan intrepertasi A (memuaskan). Walaupun nilai SAKIP Dinas Kesehatan dari tahun ke tahun terus meningkat, namun masih perlu dilakukan usaha yang lebih baik lagi agar terjadi peningkatan nilai evaluasi SAKIP di tahun selanjutnya dengan cara melakukan perbaikan di setiap komponen penilaian yang masih sangat kurang.

Tabel 3.30 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Indikator Nilai AKIP OPD tahun 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	% REALISASI ANGGARAN	% EFISIENSI ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub-kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	194.213.000	190.539.000	3.674.000	98,11%	1,89%
2	Sub-Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	162.000.000	162.000.000	0	100,00%	0,00%
JUMLAH		194.213.000	190.539.000	3.674.000	98,11%	1,89%

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 194.213.000,00 untuk mendukung tercapainya IKU Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Adapun realisasi anggaran yang mendukung IKU Nilai AKIP OPD adalah sebesar RP 190.539.000,00 atau 98,11% dengan Persentase efisiensi anggaran sebesar 1,89%.

3.3 Efektifitas Sumber Daya

a. Fasilitas Kesehatan

Dalam pencapaian target kinerja, Dinas Kesehatan bersama dengan 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah, 16 (enam belas) Puskesmas, 76 (tujuh puluh enam) Puskesmas Pembantu, 1 (satu) Unit Instalasi Farmasi dan Jejaring Kesehatan Lainnya terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dukungan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.31

Tabel 3.31 Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanjung Barat
Tahun 2025

NO	Sarana Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	RSUD	2
2.	Klinik	16
3.	Apotek	51
4.	Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan	84
5.	Puskesmas	16
6.	Puskesmas Pembantu	76
7.	Poskesdes	99
8.	Unit Tranfusi Darah	1

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2025

b. Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas

Sumber daya Kesehatan yang tersedia antara lain dokter spesialis, Dokter umum/Gigi, Perawat, Bidan Tenaga Farmasi, Gizi, Sanitasi dan Tenaga Kesehatan lainnya yang tidak kalah penting, Namun ada beberapa Fasyankes yang mana tenaga kesehatan nya belum terpenuhi. Berikut ini tabel 3.32 Jumlah Sembilan Jenis tenaga kesehatan yang terdapat Puskesmas.

Tabel 3.32 Jumlah Sembilan Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

NO	Nama Puskesmas	Dr	dr. gigi	Perawat	Bidan	Promkes	kesling	ATLM	Gizi	Kefarmasian	Keterangan
1	Pijoan Baru	2	1	18	32	1	1	1	1	1	Memenuhi
2	Lubuk Kambing	3	0	8	28	0	1	1	1	1	Tidak Memenuhi
3	Bukit Indah	1	1	8	16	1	1	1	1	3	Memenuhi
4	Teluk Nilau	2	1	12	26	1	2	2	2	3	Memenuhi
5	Senyerang	1	1	11	32	4	1	1	2	1	Memenuhi
6	Kuala Tungkal I	4	1	11	21	1	3	2	0	3	Tidak Memenuhi
7	Kuala Tungkal II	4	2	12	27	3	2	2	1	2	Memenuhi
8	Tungkal V	3	0	11	22	1	2	1	2	3	Tidak Memenuhi
9	Pelabuhan Dagang	2	1	12	20	2	1	1	2	4	Memenuhi
10	Merlung	2	1	12	32	2	1	1	1	3	Memenuhi
11	Suban	2	0	14	38	2	1	3	2	2	Tidak memenuhi
12	Purwodadi	3	0	13	13	3	1	2	1	4	Tidak memenuhi
13	Rantau Badak	1	1	4	16	2	2	2	1	1	Memenuhi
14	Sungai Saren	3	0	9	21	2	1	2	2	3	Tidak memenuhi
15	Sukarejo	3	0	15	34	2	4	2	2	2	Tidak memenuhi
16	Parit Deli	2	0	14	33	1	1	1	1	1	Tidak memenuhi

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2025

Adapun jumlah puskesmas yang memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan yaitu sebanyak 8 Puskesmas (50%) yaitu Puskesmas Pijoan baru, Puskesmas Bukit Indah, Puskesmas Teluk Nilau, Puskesmas Senyerang, Puskesmas Tungkal II, Puskesmas Pelabuhan Dagang, Puskesmas Merlung, Puskesmas Rantau badak dari 16 Puskesmas yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit

Jumlah tenaga Kesehatan di Rumah Sakit yaitu sebanyak 334 orang. Dari seluruh jumlah tenaga kesehatan, dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit sebanyak 25 orang, dokter umum 36 orang, dokter gigi 4 orang, perawat 105 orang, dan bidan sebanyak 78 orang. Berikut gambaran tenaga kesehatan RSUD yang disajikan pada tabel 3.33

**Tabel 3.33 Data Tenaga Kesehatan RSUD
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025**

N0	Unit kerja	Dokter Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	perawat	Bidan	Tenaga kesehatan masyarakat	Tenaga kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Ahli Laboratorium Medik	Apoteker
1	RSUD KH. DAUD ARIF	21	20	3	75	50	10	3	7	32	10
2	RSUD SURYAH KHAIRUDIN	4	16	1	30	28	6	2	4	7	5
	JUMLAH	25	36	4	105	78	16	5	11	39	15

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Tahun 2025

c. Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)

1. SPA di Puskesmas

Puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tentunya memerlukan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar. Sarana dan prasarana mencakup bangunan, ruang pemeriksaan, ruang rawat, laboratorium, instalasi farmasi, fasilitas sanitasi, air bersih, kelistrikan dan lain sebagainya. Ketersediaannya yang sesuai standar menentukan kualitas, nyaman dan keamanan serta efektivitas layanan kesehatan. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai standar, tenaga kesehatan akan kesulitan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan masyarakat akan merasa tidak puas akan layanan kesehatan bahkan bisa saja kehilangan kepercayaan terhadap system pelayanan kesehatan.

Untuk ketersediaan alat kesehatan yang sesuai standar di Puskesmas sangat penting untuk pelayanan kesehatan dasar seperti deteksi dini penyakit, tindakan medis cepat dalam kasus gawat darurat dan pemantauan kesehatan masyarakat. Tanpa alat kesehatan yang memadai dapat saja terjadi diagnosis salah, penanganan terlambat dan risiko komplikasi. Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar di Puskesmas dapat berdampak langsung pada penurunan angka kesakitan dan kematian melalui pelayanan preventif dan kuratif, peningkatan kesadaran masyarakat untuk rutin pemeriksaan kesehatan dan pemerataan akses layanan kesehatan. Data persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas dapat dilihat pada tabel 3.34.

**Tabel 3.34 Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
di Puskesmas tahun 2025**

No.	Puskesmas		Kelengkapan			Kumulasi (50S+10P+40A)
			Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	SUNGAI SAREN	-	57,5	39,62	71,4	61,27
2	TUNGKAL V	Ranap	46,34	35,19	60,33	50,82
3	RANTAU BADAQ	-	60	30,19	50,62	53,27
4	LUBUK KAMBING	Ranap	29,27	38,46	47,85	37,62
5	PURWODADI	Ranap	75,61	36,54	46,78	60,17
6	KUALA TUNGKAL I	-	65	48,15	42,97	54,5
7	SENYERANG	Ranap	60,98	63,04	42,24	53,69
8	PARIT DELI	-	42,5	29,63	40,97	40,6
9	PIJOAN BARU	Ranap	72,09	35,29	40,34	55,71
10	MERLUNG	Ranap	81,4	51,85	40,3	62
11	SUKOREJO	Ranap	100	50,94	37,32	70,02
12	TELUK NILAU	Ranap	60,47	50	31,21	47,72
13	SUBAN	Ranap	60,98	36,73	29,46	45,95
14	KUALA TUNGKAL II	-	72,5	35,19	26,37	50,32
15	BUKIT INDAH	-	52,5	21,15	24,9	38,33
16	PELABUHAN DAGANG	Ranap	85,37	48,94	24,55	57,4

Sumber : ASPAK Puskesmas tahun 2025

2. SPA di Rumah Sakit

Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) di RSUD masih harus terus dilakukan untuk pemenuhan SPA sesuai standar. Pemenuhan SPA RSUD yang sesuai standar menjadi salah satu upaya dalam peningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit. Data pada tabel 3.35 menyajikan persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD KH.Daud Arif dan RSUD Suryah Khairuddin.

**Tabel 3.35 Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
di Rumah Sakit Tahun 2025**

No.	Rumah Sakit	Tipe	Kelengkapan			Kumulasi (50S+20P +30A)
			Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	RS Umum Daerah KH. Daud Arif	C	62,5	77,78	43,21	59,77
2	RS Umum Daerah Suryah Khairuddin	D	88,66	56,1	35,5	66,2

Sumber : ASPAK Rumah Sakit Tahun 2025

3.4. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 adalah Rp 208.143.205.241 dengan distribusi Pagu anggaran berdasarkan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.36 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

No.	Unit Kerja>Nama Program/Uraian Sub Kegiatan	Target Capaian '	Jumlah DPA	(%)	realisasi (Rp.)	sisa anggaran (Rp.)
			Pagu Rp.			
DINAS KESEHATAN						
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			118.976.964.245,00	91,42%	108.771.588.835,00	10.186.746.557,00
01:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		356.213.000,00	98,97%	Rp 352.539.000,00	3.674.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	194.213.000,00	98,11%	Rp 190.539.000,00	3.674.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	162.000.000,00	100,00%	162.000.000,00	-
01:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		97.036.213.471,00	92,84%	90.088.199.884,00	6.948.013.587,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	612 Orang/ Bulan	95.591.356.471,00	92,78%	88.692.367.484,00	6.898.988.987,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.239.360.000,00	97,30%	1.205.895.000,00	33.465.000,00
3	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	97.452.000,00	99,85%	97.301.000,00	151.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	108.045.000,00	85,74%	92.636.400,00	15.408.600,00
01:03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		50.819.200,00	97,91%	49.757.800,00	1.061.400,00
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.819.200,00	97,91%	49.757.800,00	1.061.400,00
01:04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		218.950.000,00	98,37%	215.373.450,00	3.576.550,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	320 Paket	218.950.000,00	98,37%	215.373.450,00	3.576.550,00
01:05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		707.558.250,00	63,46%	449.051.440,00	258.506.810

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 Paket	45.712.500,00	96,31%	44.027.000,00	1.685.500
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Paket	205.784.000,00	98,53%	202.749.250,00	3.034.750
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	56.127.950,00	81,01%	45.469.390,00	10.658.560,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17 Paket	116.514.800,00	94,39%	109.975.800,00	6.539.000,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	24.000.000,00	97,56%	23.415.000,00	585.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	259.419.000,00	9,03%	23.415.000,00	236.004.000,00
01:06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		960.382.453,00	97,89%	940.136.100,00	1.617.500,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	518.128.853,00	96,40%	499.500.000,00	
1	Pengadaan Mebel	17 Unit	33.959.000,00	99,61%	33.825.000,00	134.000,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	408.294.600,00	99,64%	406.811.100,00	1.483.500,00
01:07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		729.964.700,00	83,9%	612.591.993,00	117.372.707,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.500.000,00	100,00%	10.500.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	602.049.000,00	82,10%	494.282.093,00	107.766.907,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	117.415.700,00	91,82%	107.809.900,00	9.605.800,00
01:08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.411.325.000,00	91,46%	1.290.765.532	120.559.468
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	85.798.000,00	97,97%	84.055.898,00	1.742.102,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32 Unit	486.992.000,00	80,66%	392.828.831,00	94.163.169,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	211 Unit	225.795.000,00	93,62%	211.385.500,00	14.409.500,00

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	612.740.000,00	98,33%	602.495.303,00	10.244.697,00
01:09	Peningkatan Pelayanan BLUD		17.505.538.171,00	84,39%	14.773.173.636,00	2.732.364.535,00
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	16 Unit Kerja	17.505.538.171,00	84,39%	14.773.173.636,00	2.732.364.535,00
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			83.038.840.196,00	95,94%	79.671.409.011	3.367.431.185
02:01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota		29.126.109.394,00	97,84%	28.497.457.726	628.651.668
1	Pembangunan Puskesmas	2 Unit	4.175.031.500,00	99,52%	4.155.074.425,00	19.957.075,00
2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	2 Unit	944.270.000,00	99,36%	938.192.460,00	6.077.540,00
3	Pengembangan Puskesmas	11 Unit	2.179.835.300,00	99,79%	2.175.274.474,00	4.560.826,00
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	11 Unit	1.942.000.000,00	99,04%	1.923.308.737,00	18.691.263,00
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya.	16 Unit	991.931.400,00	99,50%	987.008.674,00	4.922.726,00
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4 Unit	969.240.000,00	99,77%	967.018.286,00	2.221.714,00
8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16 Unit	8.174.500.000,00	98,45%	8.048.195.500,00	126.304.500,00
9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30 Unit	179.973.000,00	99,68%	179.393.410,00	579.590,00
10	Pengadaan Obat, Bahan Abis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan, dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2 Paket	9.201.350.194,00	95,36%	8.774.730.360,00	426.619.834,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	63898 Keluarga	21.600.000,00	100,00%	21.600.000,00	-
12	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	4 Paket	346.378.000,00	94,60%	327.661.400,00	18.716.600,00

02:02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota		53.673.803.802,00	94,98%	50.977.140.485	2.696.663.317
1	pengelola pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6290 Orang	120.949.300,00	99,45%	120.281.631,00	667.669,00
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6070 Orang	499.577.000,00	99,09%	495.025.450,00	4.551.550,00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5718 Orang	139.800.697,00	99,82%	139.545.670,00	255.027,00
4	pengelola Pelayanan Kesehatan Balita	23998 Orang	24.954.800,00	100,00%	24.954.800,00	-
5	pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	37065 Orang	24.184.800,00	100,00%	24.184.800,00	-
6	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	217986 Orang	170.667.300,00	100,00%	170.660.000,00	7.300,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	20098 Orang	123.763.800,00	98,10%	121.414.750,00	2.349.050,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	76833 Orang	36.252.600,00	99,96%	36.238.400,00	14.200,00
9	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	3767 Orang	770.907.400,00	99,79%	769.300.400,00	1.607.000,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	801 Orang	51.243.600,00	99,98%	51.232.650,00	10.950,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1855 Orang	585.694.100,00	99,77%	584.366.530,00	1.327.570,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4486 Orang	28.800.000,00	100,00%	28.800.000,00	-
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3 Dokumen	78.800.000,00	49,07%	38.666.000,00	40.134.000,00
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20 Dokumen	5.820.673.675,00	88,94%	5.176.840.212,00	643.833.463,00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	731.233.374,00	98,76%	722.167.698,00	9.065.676,00
16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	379.467.900,00	97,12%	368.552.050,00	10.915.850,00
17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	130.232.800,00	98,88%	128.769.000,00	1.463.800,00
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1363 Orang	36.240.000,00	97,13%	35.200.000,00	1.040.000,00

19	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	200 Orang	64.929.800,00	99,04%	64.304.800,00	625.000,00
20	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23 Dokumen	3.580.739.456,00	93,20%	3.337.227.409,00	243.512.047,00
21	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	32.478.433.400,00	97,60%	31.700.431.200,00	778.002.200,00
22	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	230 Paket	211.374.800,00	3,39%	7.170.000,00	204.204.800,00
23	Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	3.024.135.000,00	88,75%	2.683.935.235,00	340.199.765,00
24	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	219.755.000,00	96,91%	212.971.000,00	6.784.000,00
25	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	12 Unit	113.880.000,00	91,25%	103.920.000,00	9.960.000,00
26	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	58.109.800,00	94,49%	54.909.800,00	3.200.000,00
27	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	17.310.000,00	98,38%	17.030.000,00	280.000,00
28	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	253.171.400,00	89,11%	225.606.000,00	27.565.400,00
29	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	16 Dokumen	3.898.522.000,00	90,64%	3.533.435.000,00	365.087.000,00
02:03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		143.927.000,00	96,22%	138.480.000,00	5.447.000,00
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	143.927.000,00	96,22%	138.480.000,00	5.447.000,00
02:04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		95.000.000,00	61,40%	58.330.800,00	36.669.200,00
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	16 Unit	95.000.000,00	61,40%	58.330.800,00	36.669.200,00
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			5.525.212.800,00	92,88%	5.131.931.000,00	393.281.800,00
03:01	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Rp4.745.384.800,00	91,72%	Rp 4.352.277.900,00	Rp 393.106.900,00
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	203.220.800,00	100,00%	203.213.900,00	6.900,00
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	390Orang	4.416.300.000,00	91,58%	4.044.380.000,00	371.920.000,00

3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	125.864.000,00	83,17%	104.684.000,00	21.180.000,00
03:02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		779.828.000,00	99,98%	779.653.100	174.900
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	195 Orang	779.828.000,00	99,98%	779.653.100,00	174.900,00
4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			417.558.000,00	99,72%	416.373.309,00	1.184.691,00
04:01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		133.500.000,00	99,92%	133.395.000,00	105.000,00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen	133.500.000,00	99,92%	133.395.000,00	105.000,00
04:02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		36.085.000,00	98,97%	35.711.588,00	373.412,00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	36.085.000,00	98,97%	35.711.588,00	373.412,00
04:03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		42.090.000,00	99,94%	42.065.000,00	25.000,00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2 Dokumen	42.090.000,00	99,94%	42.065.000,00	25.000,00
04:04	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		35.473.000,00	99,94%	35.453.000,00	20.000,00

1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	35.473.000,00	99,94%	35.453.000,00	20.000,00
04:05	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		170.410.000,00	99,61%	169.748.721,00	661.279,00
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	75 Unit	170.410.000,00	99,61%	169.748.721,00	661.279,00
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			184.630.000,00	97,24%	177.782.650,00	6.847.350,00
05:01	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		90.000.000,00	97,24%	87.512.400,00	2.487.600,00
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	90.000.000,00	97,24%	87.512.400,00	2.487.600,00
05:02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		94.630.000,00	95,39%	90.270.250,00	4.359.750,00
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	94.630.000,00	95,39%	90.270.250,00	4.359.750,00
			208.143.205.241,00	93,29%	194.169.084.805,00	13.955.491.583,00

Tabel 3.36 diatas menunjukkan pagu anggaran untuk 5 (lima) program dan 76 kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun 2025 sebesar Rp 208.143.205.241 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 194.169.084.805 (93,29%). Pagu anggaran tertinggi pada dukungan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 118.976.964.245 dari Total Pagu Dinas Kesehatan Rp 208.143.205.241 (57,16%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 108.771.588.835 (91,42%). Sedangkan Pagu anggaran terendah pada Program Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat sebesar Rp 184.630.000 dari total pagu Rp 208.143.205.241 (0,09%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 177.782.650 (93,08%).

Perbandingan antara capaian kinerja utama dengan anggaran yang dipergunakan dapat dilihat pada tabel 3.37. Dari tabel tersebut diketahui bahwa

1. Indikator kinerja yang telah mencapai dan melebihi yang ditargetkan dengan realisasi anggaran 90% - 100% yaitu
 - a. Usia Harapan harapan Hidup dengan capaian kinerja 100,22% dan realisasi anggaran 94,98%
 - b. Jumlah kematian Ibu dengan capaian kinerja sebesar 155,55% dan realisasi anggaran sebesar 99,27%
 - c. Jumlah kematian balita dengan capaian kinerja sebesar 169,14% dan realisasi anggaran sebesar 100%
 - d. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang aktif dengan capaian kinerja sebesar 102,50% dan realisasi anggaran sebesar 97,60%
 - e. Nilai AKIP OPD dengan capaian kinerja sebesar 101,95% dan realisasi anggarans sebesar 98,11%
2. Indikator kinerja yang telah mencapai dan melebihi yang ditargetkan dengan realisasi anggaran sebesar 80% - 90% yaitu
 - a. Nilai Survey kepuasan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100,44% dan realisasi anggaran sebesar 84,39%
3. Indikator Kinerja yang belum mencapai target dengan realisasi anggaran 90% - 100%
 - a. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis dengan capaian kinerja 44,97% dan realisasi anggaran sebesar 99,58%
 - b. Cakupan imunisasi bayi lengkap dengan capaian kinerja sebesar 98,77% dan realisasi anggaran sebesar 98,88%
 - c. Angka keberhasilan pengobatan tuberkolusis dengan capaian kinerja sebesar 97,06% dan realisasi anggaran sebesar 99,77%
 - d. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian kinerja sebesar 56,22% dan realisasi anggaran sebesar 99,96%

- e. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (Per 1000 penduduk) dengan capaian kinerja sebesar 50,93% dan realisasi anggaran sebesar 95,79%
 - f. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup dengan capaian kinerja sebesar 0,00% dan realisasi anggaran sebesar 97,24%
4. Indikator Kinerja yang belum mencapai target dengan realisasi anggaran 80% - 90%
- a. Prevalensi stunting dengan capaian kinerja sebesar 94,74% dan realisasi anggaran sebesar 88,94%

Tabel 3.37 Perbandingan Capaian Perubahan Indikator Kinerja Utama Dengan Anggaran Tahun 2025

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	100,22%	94,98%	
2	Tercapainya Masyarakat sehat dan produktif sesuai siklus hidup dengan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Prevalensi stunting (%)	94,74%	88,94%	Data masih berdasarkan survey tahun 2024 karena data survey tahun 2025 belum dipublish
		Jumlah Kematian Ibu (Orang)	155,55%	99,27%	
		Jumlah Kematian Balita (orang)	169,14%	100%	
		Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	44,97%	99,58%	
		Cakupan Imunisasi bayi lengkap (%)	98,77%	98,88%	
		Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan yang aktif (%)	102,50%	97,60%	
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (%)	97,06%	99,77%	

		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	56,22%	99,96%	
3	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan akses sumber daya kesehatan	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (Per 1000 penduduk)	50,93%	95,79%	
4	Meningkatnya pengendalian penyakit melalui upaya pembudayaan hidup sehat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	0,00%	97,24%	Data survey belum dipublish
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan publik	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM)	100,44%	84,39%	
		Nilai AKIP OPD	101,95%	98,11%	

a. Tabel 3.38 Realisasi Anggaran SPM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No.	Indikator	Program/kegiatan/ subkegiatan	Alokasi Anggaran 2025		Total Anggaran (APBD+BOK)	Total Realisasi	% Realisasi Anggaran	Efisiensi Anggaran
			APBD	BOK				
1	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	pengelola pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	120.949.300	-	120.949.300	120.281.631	99,45	0,55
2	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	118.888.000	380.689.000	499.577.000	495.025.450	99,09	0,91
3	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	79.555.349	60.690.000	140.245.349	139.545.670	99,50	0,50
4	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar.	pengelola Pelayanan Kesehatan Balita	24.954.800	-	24.954.800	24.954.800	100,00	0,00
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar sesuai standar.	pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	24.184.800	-	24.184.800	24.184.800	100,00	0,00

6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	140.270.000	29.810.000	170.080.000	170.080.000	100,00	0,00
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun atau lebih) sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	25.963.800	97.800.000	123.763.800	121.414.750	98,10	1,90
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	36.252.600		36.252.600	36.238.400	99,96	0,04
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus (DM) sesuai standar	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	36.602.400		36.602.400	34.770.000	94,99	5,01
10	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	152.413.400		152.413.400	150.747.600	98,91	1,09

11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	76.645.000		76.645.000	75.317.430	98,27	1,73
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	28.800.000		28.800.000	28.800.000	100,00	0,00
	total		865.479.449	568.989.000	1.434.468.449	1.421.360.531	99,09	0,91

Sumber : Laporan SPM Kesehatan tahun 2025

Anggaran untuk peningkatan capaian 12 (dua belas) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan bersumber dari APBD dan APBN. Total anggaran untuk SPM Tahun 2025 sebesar Rp 1.434.468.449,00 dengan realisasi anggaran sebesar 1.421.360.531 (99,09) dan efisiensi anggaran sebesar 0,91%.

Tabel 3.39 Realisasi Anggaran Gabungan Dinas Kesehatan dan RSUD Tahun 2025

URAIAN SUB KEGIATAN LOKASI DAN VOLUME PEKERJAAN	TOTAL DANA DALAM DPA GABUNGAN (RP)	DAYA SERAP KEUANGAN (RP)	EFISIENSI ANGGARAN (RP)	% EFISIE NSI	TOTAL DPA (RP)			DAYA SERAP ANGGARAN TRIWULAN IV ANGGARAN 2025 (RP)		
	GABUNGAN				DAUD ARIF	SURYAH KHAIRUDIN	DINKES	DAUD ARIF	SURYAH KHAIRUDIN	DINKES
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	209.168.439.3 65	190.874.685.3 09	18.293.754.05 6	0,09	80.755.947.19 0	9.435.527.930	118.976.964.2 45	73.504.343.85 3	8.598.752.62 1	108.771.588.8 35
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	406.063.000	402.317.000	3.746.000	0,01	49.850.000	-	356.213.000	49.778.000	-	352.539.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	244.063.000	240.317.000	3.746.000	1,53	49.850.000		194.213.000	49.778.000		190.539.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	162.000.000	162.000.000	-	-			162.000.000			162.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124.354.874.7 12	115.200.676.9 82	9.154.197.730	7,36	22.764.359.22 3	4.554.302.018	97.036.213.47 1	20.975.977.17 8	4.136.499.92 0	90.088.199.88 4
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	122.384.697.7 12	113.297.674.5 82	9.087.023.130	7,42	22.406.039.22 3	4.387.302.018	95.591.356.47 1	20.620.257.17 8	3.985.049.92 0	88.692.367.48 4
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.764.680.000	1.713.065.000	51.615.000	2,92	358.320.000	167.000.000	1.239.360.000	355.720.000	151.450.000	1.205.895.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	97.452.000	97.301.000	151.000	0,15			97.452.000			97.301.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	108.045.000	92.636.400	15.408.600	14,26			108.045.000			92.636.400
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.819.200	49.757.800	1.061.400	2,09			50.819.200	-	-	49.757.800
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.819.200	49.757.800	1.061.400	2,09			50.819.200			49.757.800

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	302.200.000	298.410.700	3.789.300	1,25		83.250.000	218.950.000	-	83.037.250	215.373.450
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	302.200.000	298.410.700	3.789.300	1,25		83.250.000	218.950.000		83.037.250	215.373.450
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.017.841.558	1.699.163.688	318.677.870	15,79	955.092.400	355.190.908	707.558.250	896.546.940	353.565.308	449.051.440
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	324.813.300	321.940.594	2.872.706	0,88	237.773.800	41.327.000	45.712.500	236.586.594	41.327.000	44.027.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	737.206.708	730.887.190	6.319.518	0,86	378.180.400	153.242.308	205.784.000	376.142.632	151.995.308	202.749.250
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.816.000	8.816.000	-	-	8.816.000			8.816.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	204.987.550	141.384.390	63.603.160	31,03	138.280.000	10.579.600	56.127.950	85.515.000	10.400.000	45.469.390
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	181.031.000	173.583.530	7.447.470	4,11	64.516.200		116.514.800	63.607.730		109.975.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42.000.000	40.165.000	1.835.000	4,37	18.000.000		24.000.000	16.750.000		23.415.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	518.987.000	282.386.984	236.600.016	45,59	109.526.000	150.042.000	259.419.000	109.128.984	149.843.000	23.415.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.475.783.753	2.402.668.200	73.115.553	2,95	1.515.401.300	-	960.382.453	1.462.532.100	-	940.136.100
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.394.528.853	1.357.500.000	37.028.853	2,66	876.400.000		518.128.853	858.000.000		499.500.000
Penggandaan Mebel	61.809.000	61.475.000	334.000	0,54	27.850.000		33.959.000	27.650.000		33.825.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.019.445.900	983.693.200	35.752.700	3,51	611.151.300		408.294.600	576.882.100		406.811.100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.959.798.700	3.570.023.562	389.775.138	9,84	2.697.641.000	532.193.000	729.964.700	2.467.129.597	490.301.972	612.591.993
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.000.000	16.844.400	2.155.600	11,35	8.500.000		10.500.000	6.344.400		10.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.441.973.000	2.070.014.890	371.958.110	15,23	1.491.464.000	348.460.000	602.049.000	1.264.202.818	311.529.979	494.282.093
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.498.825.700	1.483.164.272	15.661.428	1,04	1.197.677.000	183.733.000	117.415.700	1.196.582.379	178.771.993	107.809.900

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.772.390.000	3.531.479.218	240.910.782	6,39	1.985.010.000	376.055.000	1.411.325.000	1.880.144.886	360.568.800	1.290.765.532
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.398.000	116.186.466	6.211.534	5,07	36.600.000	-	85.798.000	32.130.568		84.055.898
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.006.187.000	850.867.724	155.319.276	15,44	232.700.000	286.495.000	486.992.000	184.840.093	273.198.800	392.828.831
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.872.315.000	1.812.001.125	60.313.875	3,22	1.556.960.000	89.560.000	225.795.000	1.513.245.625	87.370.000	211.385.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	612.740.000	602.495.303	10.244.697	1,67		-	612.740.000	-		602.495.303
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.750.000	149.928.600	8.821.400	5,56	158.750.000			149.928.600		
Peningkatan Pelayanan BLUD	71.828.668.442	63.720.188.159	8.108.480.283	11,29	50.788.593.267	3.534.537.004	17.505.538.171	45.772.235.152	3.174.779.371	14.773.173.636
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	71.828.668.442	63.720.188.159	8.108.480.283	11,29	50.788.593.267	3.534.537.004	17.505.538.171	45.772.235.152	3.174.779.371	14.773.173.636
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	118.045.745.796	113.864.669.110	4.181.076.686	3,54	26.992.544.600	8.014.361.000	83.038.840.196	26.262.322.994	7.930.937.105	79.671.409.011
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	58.213.632.994	57.380.445.680	833.187.314	1,43	23.438.883.600	5.648.640.000	29.126.109.394	23.249.958.671	5.633.029.283	28.497.457.726
Pengembangan Puskesmas	4.175.031.500	4.155.074.425	19.957.075	0,48			4.175.031.500	-	-	4.155.074.425
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	944.270.000	938.192.460	6.077.540	0,64			944.270.000			938.192.460

Pengembangan Puskesmas	2.179.835.300	2.175.274.474	4.560.826	0,21			2.179.835.300			2.175.274.474
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.942.000.000	1.923.308.737	18.691.263	0,96			1.942.000.000			1.923.308.737
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.475.760.000	1.473.209.293	2.550.707	0,17		1.475.760.000	-		1.473.209.293	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	5.983.274.200	5.968.567.740	14.706.460	0,25	5.271.594.200	711.680.000		5.261.099.232	707.468.508	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	991.931.400	987.008.674	4.922.726	0,50			991.931.400			987.008.674
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	969.240.000	967.018.286	2.221.714	0,23			969.240.000			967.018.286
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.667.839.400	15.434.485.489	233.353.911	1,49	6.493.339.400	1.000.000.000	8.174.500.000	6.386.389.989	999.900.000	8.048.195.500
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibras	497.360.000	448.893.180	48.466.820	9,74	497.360.000			448.893.180		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	794.973.000	793.983.838	989.162	0,12	615.000.000		179.973.000	614.590.428		179.393.410
Pengembangan Rumah Sakit	1.061.590.000	1.055.719.468	5.870.532	0,55	1.061.590.000			1.055.719.468		
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehata	21.162.550.194	20.710.448.216	452.101.978	2,14	9.500.000.000	2.461.200.000	9.201.350.194	9.483.266.374	2.452.451.482	8.774.730.360
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	21.600.000	21.600.000	-	-			21.600.000			21.600.000
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	346.378.000	327.661.400	18.716.600	5,40		-	346.378.000	-		327.661.400
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota	59.593.185.802	56.287.412.630	3.305.773.172	5,55	3.553.661.000	2.365.721.000	53.673.803.802	3.012.364.323	2.297.907.822	50.977.140.485
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	120.949.300	120.281.631	667.669	0,55	-	-	120.949.300	-		120.281.631
pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	499.577.000	495.025.450	4.551.550	0,91		-	499.577.000	-		495.025.450

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	238.556.697	237.491.503	1.065.194	0,45	98.756.000	-	139.800.697	97.945.833		139.545.670
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24.954.800	24.954.800	-	-		-	24.954.800	-		24.954.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.184.800	24.184.800	-	-		-	24.184.800	-		24.184.800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	170.667.300	170.660.000	7.300	0,00		-	170.667.300	-		170.660.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	123.763.800	121.414.750	2.349.050	1,90		-	123.763.800	-		121.414.750
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	36.252.600	36.238.400	14.200	0,04		-	36.252.600	-		36.238.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	770.907.400	769.300.400	1.607.000	0,21		-	770.907.400	-		769.300.400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	51.243.600	51.232.650	10.950	0,02		-	51.243.600	-		51.232.650
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	585.694.100	584.366.530	1.327.570	0,23		-	585.694.100			584.366.530
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	28.800.000	28.800.000	-	-		-	28.800.000			28.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	78.800.000	38.666.000	40.134.000	50,93		-	78.800.000			38.666.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.820.673.675	5.176.840.212	643.833.463	11,06		-	5.820.673.675			5.176.840.212
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	731.233.374	722.167.698	9.065.676	1,24		-	731.233.374			722.167.698
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	379.467.900	368.552.050	10.915.850	2,88		-	379.467.900			368.552.050
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	130.232.800	128.769.000	1.463.800	1,12		-	130.232.800			128.769.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	36.240.000	35.200.000	1.040.000	2,87		-	36.240.000			35.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	64.929.800	64.304.800	625.000	0,96		-	64.929.800			64.304.800
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.580.739.456	3.337.227.409	243.512.047	6,80		-	3.580.739.456			3.337.227.409

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	32.478.433.400	31.700.431.200	778.002.200	2,40		-	32.478.433.400			31.700.431.200
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.397.536.000	5.043.336.312	354.199.688	6,56	3.224.500.000	2.173.036.000		2.914.418.490	2.128.917.822	-
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional	211.374.800	7.170.000	204.204.800	96,61		-	211.374.800	-	-	7.170.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	3.024.135.000	2.683.935.235	340.199.765	11,25		-	3.024.135.000			2.683.935.235
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	219.755.000	212.971.000	6.784.000	3,09		-	219.755.000			212.971.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	536.970.000	272.910.000	264.060.000	49,18	230.405.000	192.685.000	113.880.000		168.990.000	103.920.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	58.109.800	54.909.800	3.200.000	5,51			58.109.800			54.909.800
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	17.310.000	17.030.000	280.000	1,62			17.310.000			17.030.000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	253.171.400	225.606.000	27.565.400	10,89			253.171.400			225.606.000
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	3.898.522.000	3.533.435.000	365.087.000	9,36			3.898.522.000			3.533.435.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	143.927.000	138.480.000	5.447.000	3,78			143.927.000	-	-	138.480.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	143.927.000	138.480.000	5.447.000	3,78			143.927.000			138.480.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000	58.330.800	36.669.200	38,60			95.000.000	-	-	58.330.800
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	95.000.000	58.330.800	36.669.200	38,60			95.000.000			58.330.800
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.045.702.800	7.600.966.000	444.736.800	5,53	-	2.520.490.000	5.525.212.800	-	2.469.035.000	5.131.931.000
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.265.874.800	6.821.312.900	444.561.900	6,12		2.520.490.000	4.745.384.800	-	2.469.035.000	4.352.277.900

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	203.220.800	203.213.900	6.900	0,00			203.220.800			203.213.900
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	6.936.790.000	6.513.415.000	423.375.000	6,10		2.520.490.000	4.416.300.000		2.469.035.000	4.044.380.000
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	125.864.000	104.684.000	21.180.000	16,83			125.864.000			104.684.000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	779.828.000	779.653.100	174.900	0,02			779.828.000			779.653.100
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	779.828.000	779.653.100	174.900	0,02			779.828.000			779.653.100
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	417.558.000	416.373.309	1.184.691	0,28	-	-	417.558.000	-	-	416.373.309
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	133.500.000	133.395.000	105.000	0,08			133.500.000			133.395.000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	36.085.000	35.711.588	373.412	1,03			36.085.000			35.711.588
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	42.090.000	42.065.000	25.000	0,06			42.090.000			42.065.000
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	35.473.000	35.453.000	20.000	0,06			35.473.000			35.453.000

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	170.410.000	169.748.721	661.279	0,39			170.410.000			169.748.721
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	184.630.000	177.782.650	6.847.350	3,71	-	-	184.630.000	-	-	177.782.650
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	87.512.400	2.487.600	2,76						87.512.400
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	90.000.000	87.512.400	2.487.600	2,76			90.000.000			87.512.400
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.630.000	90.270.250	4.359.750	4,61						87.512.400
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	94.630.000	90.270.250	4.359.750	4,61		-	94.630.000			87.512.400
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN 5 PROGRAM DAN 81 SUB KEGIATAN	335.862.075.961	312.934.476.378	22.927.599.583	6,83	107.748.491.790	19.970.378.930	208.143.205.241	99.766.666.847	18.998.724.726	194.169.084.805

Sumber: Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Jika digabungkan Pagu Dinas Kesehatan dan Pagu Rumah Sakit Umum Daerah, maka total Anggaran untuk kesehatan pada tahun 2025 sebesar Rp 335.862.075 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 312.934.476.378 dan efisiensi anggaran sebanyak 6,83%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan respon atau rasa kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan berdasarkan pada instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah demi terwujudnya pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tanjung Tabung Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan dana yang diterima selama satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2025 serta merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana kerja Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan Instansi Pemerintah yang membidangi pembangunan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melihat dari realisasi kinerja dan realisasi keuangan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik untuk mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekalipun demikian, bukanlah berarti bahwa pembangunan kesehatan telah terpenuhi semuanya masih diperlukan program-program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian pembangunan Kesehatan. Akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kesehatan serta banyaknya penyakit-penyakit yang timbul baik yang bersumber dari masyarakat itu sendiri maupun yang bersumber dari pengaruh alam, maka pembangunan kesehatan untuk yang akan datang tidak tertutup kemungkinan akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi seperti telah ditetapkan bahwa dana pembangunan kesehatan harus mencapai minimal 15% dari Total Dana APBD.

Masalah kesehatan bukanlah tanggung jawab Dinas kesehatan semata sebagai motor penggerak di bidang kesehatan, tetapi melainkan tanggung jawab

kita semua terlebih dari Pemerintah Daerah sebagai penyuplai anggaran untuk semua pembangunan di daerah. Untuk itu diperlukan dukungan lintas sektor dan *stakeholder* lainnya untuk pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun dan semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk dipedomani atau sebagai pembanding untuk tahun tahun berikutnya.

Kuala Tungkal, Januari 2026

PLT.KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

TANJUNGPINANG, KABUPATEN TANJUNGPINANG



SALAH SAHATUPANG, SKM, MPH

Pembina Tk.I/IV. b

NIP. 19730106 199203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0742) 21144 Fax. (0742) 21084

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ZAHARUDIN, SKM, MKM**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

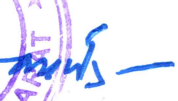
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

Pihak Pertama,

H. ZAHARUDIN, SKM, MKM
Pembina Tk.I/IV. b
NIP. 19670407 199103 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan 2 Presentase Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil 3 Angka harapan Hidup	82% 50% 68,49%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kematian Ibu 2 Angka Kematian Neonatal	180 /100.000 KLH 9 / 1000 KLH
3	Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat	1 Prevalensi Stunting	15%
4	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Success rate TBC 2 Persentase Desa/Kelurahan UCI 3 Persentase Penemuan Kasus HIV/AIDS yang di obati 4 Prevalensi Hipertensi 5 Prevalensi Diabetes Melitus (DM)	100% 95% 62% 30,50% 1,50%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja Perangkat Daerah	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2 Nilai AKIP	84% 78%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 119.170.305.315	APBD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 81.721.791.425	APBD, APBN
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 6.245.388.000	APBD
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 425.473.000	APBD, APBN
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 184.630.000	APBD, APBN

Kuala Tungkal, 14 Februari 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT


Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

KEPALA DINAS KESEHATAN


H. ZAHARUDIN, SKM, MKM
Pembina Tk. I/IV. b
NIP. 19670407 199103 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	12 Laporan
2	Menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Bulanan dan Tahunan)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Laporan Keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	12 Laporan
3	Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP/LAKIP) Setiap Triwulan dan Tahunan	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	4 Laporan
4	Menyampaikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi, IKU	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Nilai AKIP Perangkat Daerah	78%
5	Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Laporan
6	Menyampaikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen
7	Menyampaikan Bahan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Bahan/ data penyusunan LKPJ	1 Laporan
8	Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
9	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	1 Laporan
10	Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan APIP	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Rekomendasi BPK RI dan Itkab yang dapat diselesaikan setelah penertiban laporan	3 Laporan
11	Melaporkan Rencana Aksi MCP KPK	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Dokumen Kepatuhan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi MCP KPK	1 Dokumen
12	Menyampaikan Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Laporan TPP yang disampaikan	12 Laporan

Kuala Tungkal, 24 Februari 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT


Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

KEPALA DINAS KESEHATAN


H. ZAHARUDIN, SKM, MKM

Pembina Tk. I/IV. b

NIP. 19670407 199103 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	73,41	73,59	73,76	73,94	74,12	74,29	74,29
Tercapainya Masyarakat Sehat dan Produktif Sesuai Siklus Hidup Dengan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau	Prevalensi Stunting (%)	%	7	6,65	6,32	6,00	5,70	5,42	5,25
	Jumlah kematian ibu (Orang)	Orang	4	9	8	7	6	5	4
	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	%	0	36	46	55	61	70	70
	Jumlah Kematian Balita (Orang)	Orang	30	94	87	82	79	75	70
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	%	80,5	81	85	90	93	95	95
	Cakupan kepesertaan Jaminan kesehatan yang aktif (%)	%	74,6	80,0	80,5	81,5	82,5	83,5	83,75
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (%)	%	89,22	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	%	60,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan Pemerataan Akses Sumber Daya Kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesahatan terhadap Populasi (Per 1000 Penduduk)	Per 1000 Penduduk	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Melalui Upaya Pembudayaan Hidup Sehat	Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	%	0	65,00	66,10	67,90	69,70	80,00	80,00
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Nilai AKIP OPD (*)	*	78,04	78,5	79	80	81	82	82
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	*	87,68	87,75	87,90	88,00	88,25	88,50	88,75

Kuala Tungkal, 28 Oktober 2025



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

H. ZAHARUDIN, SKM, MKM
Pembina TK.I/IV b
NIP. 196704 07199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0742) 21144 Fax. (0742) 21084

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ZAHARUDIN, SKM, MKM**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 28 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

H. ZAHARUDIN, SKM, MKM

Pembina Tk.I/IV. b

NIP. 19670407 199103 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	73,59 Tahun
2	Tercapainya masyarakat sehat dan produktif sesuai siklus hidup dengan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	1. Prevalensi Stunting 2. Jumlah kematian ibu 3. Jumlah kematian Balita 4. Cakupan Penerima pemeriksaan Kesehatan gratis 5. Cakupan Imunisasi bayi lengkap 6. Cakupan kepesertaan Jaminan kesehatan yang aktif 7. Angka keberhasilan pengobatan TB 8. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6,65% 9 orang 94 orang 36% 81% 80% 90% 100%
3	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan akses Sumber Daya Kesehatan	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi	5,4 / 1000 Penduduk
4	Meningkatnya pengendalian penyakit melalui upaya pembudayaan hidup sehat	Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup	65%
5.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan publik	1. Nilai AKIP OPD 2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	78,5 87,75

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 118.888.569.245,00	APBD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 83.127.235.196,00	APBD, APBN
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 5.525.212.800,00	APBD
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 417.558.000,00	APBD, APBN
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 184.630.000,00	APBD, APBN

Kuala Tungkal, 28 Oktober 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS KESEHATAN



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag



H. ZAHARUDIN, SKM, MKM

Pembina Tk. I/IV. b

NIP. 19670407 199103 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	12 Laporan
2	Menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Bulanan dan Tahunan)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Laporan Keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	12 Laporan
3	Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP/LAKIP) Setiap Triwulan dan Tahunan	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	4 Laporan
4	Menyampaikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi, IKU	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Nilai AKIP Perangkat Daerah	78%
5	Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Laporan
6	Menyampaikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen
7	Menyampaikan Bahan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Bahan/ data penyusunan LKPJ	1 Laporan
8	Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
9	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	1 Laporan
10	Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan APIP	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Rekomendasi BPK RI dan Itkab yang dapat diselesaikan setelah penertiban laporan	3 Laporan
11	Melaporkan Rencana Aksi MCP KPK	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Dokumen Kepatuhan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi MCP KPK	1 Dokumen
12	Menyampaikan Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	- Ketepatan Waktu Penyampaian	Tepat Waktu
		- Jumlah Laporan TPP yang disampaikan	12 Laporan

Kuala Tungkal, 28 Oktober 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS KESEHATAN

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

H. ZAHARUDIN, SKM, MKM
Pembina Tk. I/IV. b
NIP. 19670407 199103 1 006